

**ANALISIS PERBANDINGAN  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010-2014  
(STUDI PADA TIGAKABUPATEN PEMEKARAN PROVINSI BENGKULU)**

**TESIS**



**OLEH :**

**AKIRA  
NPM. C2B014049**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTERMANAJEMEN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
2016**

**ANALISIS PERBANDINGAN  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010-2014  
(STUDI PADA TIGAKABUPATEN PEMEKARAN PROVINSI BENGKULU)**

**TESIS**


**OLEH :**

**AKIRA  
NPM. C2B014049**


**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
2016**

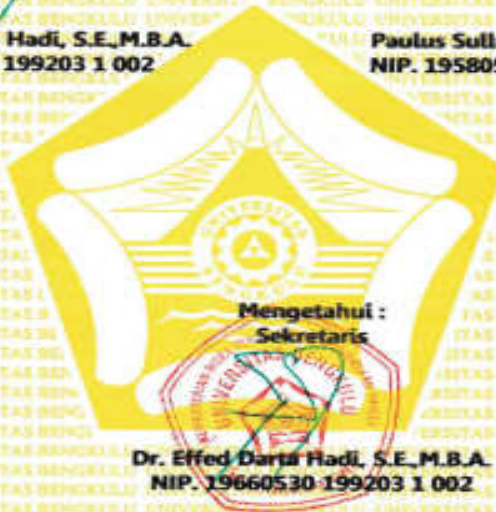
Tesis oleh Akira ini  
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Bengkulu, \_\_\_\_ Desember 2016  
Pembimbing Utama,

  
Dr. Effed Darto Hadi, S.E., M.B.A.  
NIP. 19660530 199203 1 002

Bengkulu, \_\_\_\_ Desember 2016  
Pembimbing Pendamping,

  
Paulus Sulluk Kananlua, S.E., M.SI.  
NIP. 19580510 198903 1 002



Mengetahui :  
Sekretaris  
Dr. Effed Darto Hadi, S.E., M.B.A.  
NIP. 19660530 199203 1 002

Tesis oleh Akira ini  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada hari Selasa, 27 Desember 2016

Bengkulu, 27 Desember 2016

Dewan Penguji :

Ketua,



**Dr. Slamet Widodo, S.E., M.S.**  
NIP. 19611221 198702 1 001

Sekretaris,



**Dr. Effed Darta Hadi, S.E., M.B.A.**  
NIP. 19660530 199203 1 002

Anggota I,



**Dr. Nurna Aziza, S.E., M.S., Ak.**  
NIP. 19760510 200003 2 001

Anggota II,



**Dr. Fahrudin JS. Pareke, S.E., M.S.**  
NIP. 19710914 199903 1 004



Mengetahui :  
Koordinator Program,



**Dr. Slamet Widodo, S.E., M.S.**  
NIP. 19611221 198702 1 001

## **PERSEMBAHAN DAN MOTTO**

### **MOTTO**

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.”

“Kita akan sukses jika belajar dari kesalahan.”

“Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia terlihat lebih baik dari kita.”

“Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik, maka kamu akan menjadi yang terbaik.”

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik yang saya persembahkan untuk:

- 1) Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
- 2) Istri dan anak yang selalu memberi dukungan dan doa.
- 3) Saudara dan teman-teman semua yang telah memberikan dukungannya.



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis dengan judul :

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010-2014  
(STUDI PADA TIGA KABUPATEN PEMEKARAN PROVINSI BENGKULU)**

Yang diajukan untuk diuji pada tanggal ..... 2016, adalah hasil karya saya.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, atau yang saya ambil dari orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tesis yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Bengkulu, 2016

Yang membuat pernyataan



**COMPARATIVE ANALYSIS ON FINANCIAL PERFORMANCE  
OF LOCAL GOVERNMENT FISCAL AT 2010-2014  
(STUDY AT THREE DISTRICTS AREA OF  
PROLIFERATION IN BENGKULU PROVINCE)**

**by:  
Akira 1)  
Effed Darta Hadi 2)  
Paulus Sulluk Kananlua 3)**

**ABSTRACT**

This study aims were (1) measuring financial performance of local government in three districtsredistriction. They are: Mukomuko, Seluma and Bengkulu Tengah districts area. Analysis methods that used on this study were government financial ratio approache that are ratio independence, ratio degree of fiscal decentralization, ratio effectiveness, rasio efficiency, ratio of harmony between expenditure and ratio of financial dependency. (2) assessing Local Government Financial Capabilities at the three of Districts Redistricting (Mukomuko, Seluma and Bengkulu Tengah) that measured by Share and Growth and Regional Financial capability Mapping. The data used in this research is secondary data based on Financial Revenue and Expenditure Realization Report from the three districts area.

The results of this study can be concluded that all result from financial analysis show the three of districts area (Mukomuko, Seluma, and Bengkulu Tengah districts) have the same condition on financial ability budgeting. The result show that supporting of financial that come from the local area is low. Based on Share and Growth of the result found the condition financial at the three district area have not ideal financial condition. Moreover, the result of financial ability of the three districts area based on mapping, its position on Quadrant II. Its means the share of financial is low however the growth of financial ability is high.

Keywords: Financial ratios, financial capability,the financial performance of local governments.

- 1) Students
- 2) Top Advisors
- 3) Supervising Companion

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010-2014  
(STUDI PADA TIGA KABUPATEN PEMEKARAN PROVINSI BENGKULU)**

Oleh :  
Akira <sup>1)</sup>  
Effed Dartta Hadi <sup>2)</sup>  
Paulus Sulluk Kananlua <sup>3)</sup>

**RINGKASAN**

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan. akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah berpedoman pada Undang-undang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan. Permasalahan kinerja keuangan pemerintah daerah yang terjadi pada tiga kabupaten pemekaran provinsi bengkulu antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah pada tiga kabupaten pemekaran (Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah) berdasarkan rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio ketergantungan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2010 - 2014. (2) Menilai kemampuan keuangan pemerintahan daerah pada tiga kabupaten pemekaran (Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah) diukur melalui *Share* dan *Growth*, dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah untuk anggaran tahun 2010 - 2014.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Keuangan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Metode pengumpulan sampel pada tiga kabupaten pemekaran Provinsi Bengkulu dengan pencarian pengumpulan data langsung dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan



dan Aset Daerah DPPKAD, dan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah pada tiga kabupaten pemekaran (Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah) tahun anggaran 2010-2014 Provinsi Bengkulu dapat disimpulkan, bahwa rasio kemandirian Daerah Kabupaten Mukomuko, Seluma, Bengkulu Tengah berada pada kriteria “Rendah Sekali” dengan pola hubungan “instruktif” yang memiliki makna bahwa peran pemerintah pusat sebagai sumber keuangan daerah lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan kata lain pemerintah daerah tiga kabupaten pemekaran belum mampu melaksanakan fungsi otonomi daerah secara maksimal. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal ketiga daerah tersebut memiliki kondisi yang sama yakni berada pada kategori “Sangat Kurang” hal ini menandakan besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah tiga kabupaten pemekaran kepada pemerintah pusat yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah. Selanjutnya, ditinjau dari sisi rasio efektivitas keuangan daerah diperoleh hasil bahwa dua kabupaten memiliki nilai rasio yang sama yakni Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Tengah dengan kriteria rasio berada pada kategori “Cukup Efektif” hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah belum mampu memenuhi pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Sementara untuk Kabupaten Seluma nilai rasio efektivitasnya berada pada kategori “Sangat Efektif” yang artinya Kabupaten Seluma telah mengoptimalkan sumber penerimaan daerah terlihat dari besarnya realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi diperoleh bahwa Kabupaten Mukomuko, Seluma, Bengkulu Tengah memiliki nilai rasio yang berada pada kategori “Tidak Efisien” hal ini mengandung makna bahwa realisasi belanja tiga kabupaten pemekaran lebih besar dari pada realisasi pendapatannya. Kemudian dilihat dari sisi rasio keserasian belanja daerah bahwa keserasian belanja di Kabupaten Mukomuko “Telah Sesuai” dengan peruntukannya yang terlihat dari besarnya belanja langsung dari pada belanja tidak langsung. Namun nilai rasio keserasian belanja untuk Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah “Belum Sesuai” dengan peruntukannya yang terlihat dari besarnya belanja tidak langsung dari pada belanja langsung seharusnya dalam penggunaan anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja langsung agar kualitas output meningkat dan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi pemerintah bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya ditinjau dari rasio ketergantungan diperoleh bahwa tingkat ketergantungan keuangan pada Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah tergolong “Tinggi” hal ini mengandung makna bahwa tingkat ketergantungan keuangan tiga kabupaten pemekaran terhadap pemerintah pusat maupun provinsi masih tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah ditemukan bahwa dari sisi nilai *Share* pendapatan asli daerah atas total belanja daerah pada tiga kabupaten pemekaran menunjukkan hasil yang rendah. Namun dilihat dari sisi nilai pertumbuhan (*Grwoth*) pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada ketiga kabupaten pemekaran tersebut menunjukkan hasil yang tinggi. Dengan posisi yang sedemikian dilihat

dari tingkat *Share* dan *Growth* atas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai daerahnya menempatkan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah berada pada peta kemampuan keuangan daerah menurut bapenas 2003 termasuk pada kuadran II. Jika dihubungkan dengan Tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran maka dapat dimaknai bahwa Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Bengkulu Tengah kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

**Kata Kunci :** Rasio Keuangan, Kemampuan Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

- 1) Mahasiswa
- 2) Pembimbing Utama
- 3) Pembimbing Pendamping

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan dan rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Tiga Kabupaten Pemekaran (Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah) Tahun Anggaran 2010-2014” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Dua (S2) pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku *Executing Agency* Program Beasiswa STAR yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan (*Project Implementing Unit – PIU*) Program Beasiswa S2 Bidang Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Beasiswa STAR S2 pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Bengkulu. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan pada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, kepada :

1. Bapak Dr. Effed Darta Hadi, S.E., M.B. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Paulus Sulluk Kananlua, S.E., M.Si selaku Pembimbing Pendamping, yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Nurna Aziza, SE., M.Si. AK dan Bapak Dr. Fahrudin Js Pareke, SE., M.Si. selaku tim penguji yang memberikan masukan dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penyusunan tesis ini.
3. Kepala dan Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mukomuko yang telah memberikan izin meneliti sehingga penelitian ini berjalan dengan baik

4. Segenap Dosen dan Staf pengajar Program Pascasarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
5. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat bermanfaat untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bengkulu, 2016

Penulis.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN(Cover)</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTO</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
1.5 Pembatasan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengukuran Kinerja.....	10
2.1.1 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja.....	11
2.1.2 Manfaat Pengukuran Kinerja .....	11
2.2 Laporan Keuangan .....	12
2.2.1 Peranan Pelaporan Keuangan .....	17
2.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan .....	18
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	19
2.3.1 Proses Penyusunan APBD .....	23
2.3.2 Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD .....	24
2.4 Belanja Daerah .....	28
2.5 Surplus/Defisit APBD .....	30

2.6 Analisis Laporan Keuangan.....	31
2.6.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	32
2.6.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	32
2.6.1.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal .....	34
2.6.1.3 Rasio Efektifitas .....	35
2.6.1.4 Rasio Efisiensi .....	35
2.6.1.5 Rasio Keserasian Belanja .....	36
2.6.1.6 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .....	37
2.6.2 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah.....	38
2.6.2.1 Perhitungan dan Analisis <i>Share and Growth</i> .....	38
2.6.2.2 Peta Kemampuan Keuangan daerah .....	39
2.7 Penelitian Terdahulu.....	40
2.8 Kerangka Analisis .....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Desain Penelitian .....	46
3.2. Definisi Operational .....	46
3.3 Metode Pengambilan Sampel .....	50
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	51
3.5 Metode Analisis .....	51

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	59
4.1.1. Gambaran Umum Kinerja Keuangan pada Tiga Kabupaten .....	59
4.1.1.1 Deskripsi Penerimaan daerah pada Tiga Kabupaten .....	61
A. Deskripsi Tentang PAD .....	63
B. Deskripsi Tentang Pendapatan yang Berasal Dari Dana Perimbangan .....	65
C. Deskripsi Tentang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	68
D. Deskripsi Tentang Penerimaan Total Daerah .....	70
4.1.1.2 Deskripsi Belanja Daerah pada Tiga Kabupaten ...	72
4.1.2. Hasil Perhitungan Analisis Perbandingan Kinerja ..Keuangan pada Tiga Kabupaten di Provinsi Bengkulu .....	78
4.1.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	78
A. Rasio Kemandirian Keuangan Kab. Mukomuko ....	78
B. Rasio Kemandirian Keuangan Kab. Seluma .....	80
C. Rasio Kemandirian Keuangan Kab. Bengkulu Tengah .....	81
4.1.2.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal .....	84
A. Rasio DDF Kab. Mukomuko .....	85
B. Rasio DDF Kab. Seluma .....	86
C. Rasio DDF Kab. Bengkulu Tengah .....	87
4.1.2.3. Rasio Efektifitas .....	89
A. Rasio Efektifitas Keuangan Kab. Mukomuko ....	90

B. Rasio Efektifitas Keuangan Kab. Seluma .....	91
C. Rasio Efektifitas Keuangan Kab. Bengkulu Tengah	92
4.1.2.4. Rasio Efisiensi .....	94
A. Rasio Efisiensi Keuangan Kab. Mukomuko .....	95
B. Rasio Efisiensi Keuangan Kab. Seluma .....	95
C. Rasio Efisiensi Keuangan Kab. Bengkulu Tengah .	96
4.1.2.5. Rasio Keserasian Belanja .....	98
A. Rasio Keserasian Belanja Kab. Mukomuko .....	99
B. Rasio Keserasian Belanja Kab. Seluma .....	101
C. Rasio Keserasian Belanja Kab. Bengkulu Tengah ..	103
4.1.2.6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	106
A. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Mukomuko .....	107
B. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Seluma .....	108
C. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Bengkulu Tengah .....	110
4.1.3. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pada Tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu .....	112
4.1.3.1. <i>Share and Growth</i> .....	112
A. <i>Share and Growth</i> Kabupaten Mukomuko .....	113
B. <i>Share and Growth</i> Kabupaten Seluma .....	115
C. <i>Share and Growth</i> Kabupaten Bengkulu Tengah ....	116
4.1.3.2. Peta Kemampuan Keuangan Daerah .....	119
4.2 Pembahasan .....	121
4.2.1 Rasio Kemandirian .....	121
4.2.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	125
4.2.3 Rasio Efektivitas .....	128
4.2.4 Rasio Efisiensi .....	131
4.2.5 Rasio Keserasian Belanja .....	133
4.2.6 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .....	136
4.2.7 <i>Share dan Growth</i> .....	138
4.2.8 Peta Kemampuan Keuangan Daerah .....	139
4.3 Implikasi Strategis .....	140

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	143
5.2 Saran.....	146

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	149
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	152
--------------------------------	-----

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah .....	33
Tabel 2.2 Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	34
Tabel 2.3 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan.....	35
Tabel 2.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan .....	36
Tabel 2.5 Ketergantungan Keuangan Daerah .....	38
Tabel 2.6 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran .....	39
Tabel 3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah .....	52
Tabel 3.2 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal .....	53
Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan .....	54
Tabel 3.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan .....	54
Tabel 3.5 Ketergantungan Keuangan Daerah .....	56
Tabel 3.6. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran.....	58
Tabel 4.1 Penerimaan Daerah Tiga Kabupaten Pemekaran.....	62
Tabel 4.2 Belanja Daerah Tiga Kabupaten Pemekaran .....	73
Tabel 4.3 Perbandingan Rasio Kemandirian Tiga Kabupaten .....	78
Tabel 4.4 Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tiga Kabupaten.	85
Tabel 4.5 Perbandingan Rasio Efektifitas Tiga Kabupaten.....	90
Tabel 4.6 Perbandingan Rasio Efisiensi Tiga Kabupaten.....	94
Tabel 4.7 Perbandingan Rasio Kecerahan Belanja Tidak Langsung Tiga Kabupaten .....	98
Tabel 4.8 Perbandingan Kecerahan Belanja Langsung Tiga Kabupaten.....	99
Tabel 4.9 Perbandingan Ketergantungan Keuangan Daerah Tiga Kabupaten .....	107
Tabel 4.10 Perbandingan <i>Share</i> Keuangan Daerah Tiga Kabupaten .....	112
Tabel 4.11 Perbandingan <i>Growth</i> 3 Kabupaten .....	113
Tabel 4.12 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah .....	120
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Kab. Mukomuko .....	158
Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Kab. Seluma .....	158
Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Kab. Benteng.....	158
Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kab. Mukomuko.....	159
Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kab. Seluma.....	159
Tabel 4.18 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	



Kab. Benteng .....	159
Tabel 4.19 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Kab. Mukomuko .....	160
Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas Kab. Seluma .....	160
Tabel 4.21 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Kab. Benteng .....	160
Tabel 4.22 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Kab. Mukomuko .....	161
Tabel 4.23 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Kab. Seluma .....	161
Tabel 4.24 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Kab. Benteng .....	161
Tabel 4.25 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Kab. Mukomuko.....	162
Tabel 4.26 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Langsung Kab. Mukomuko .....	162
Tabel 4.27 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Kab. Seluma .....	162
Tabel 4.28 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Langsung Kab.Seluma .....	163
Tabel 4.29 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Kab. Benteng .....	163
Tabel 4.30 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Langsung Kab. Benteng .....	163
Tabel 4.31 Hasil Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kab. Mukomuko.....	164
Tabel 4.32 Hasil Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kab.Seluma .....	164
Tabel 4.33 Hasil Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kab.Benteng .....	164
Tabel 4.34 Hasil Perhitungan <i>Share</i> Kab. Mukomuko .....	165
Tabel 4.35 Hasil Perhitungan <i>Growth</i> Kab. Mukomuko .....	165
Tabel 4.36 Hasil Perhitungan <i>Share</i> Kab. Seluma .....	165
Tabel 4.37 Hasil Perhitungan <i>Growth</i> Kab. Seluma .....	166
Tabel 4.38 Hasil Perhitungan <i>Share</i> Kab. Benteng .....	166
Tabel 4.39 Hasil Perhitungan <i>Growth</i> Kab. Benteng.....	166

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	
Peta Kemampuan Keuangan berdasarkan Metode Kuadran rata-ratan Share dan Growth .....	39
Gambar 2.2	
Kerangka Analisis .....	45
Gambar 4.1	
Peta Kemampuan Keuangan berdasarkan Metode Kuadran <i>Share and Growth</i> .....	119

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 APBD Tahun 2010.....	153
Lampiran 2 APBD Tahun 2011.....	154
Lampiran 3 APBD Tahun 2012.....	155
Lampiran 4 APBD Tahun 2013.....	156
Lampiran 5 APBD Tahun 2014.....	157
Lampiran 6 Tabel 4.13, Tabel 4.14, Tabel 4.15.....	158
Lampiran 7 Tabel 4.16, Tabel 4.17, Tabel 4.18.....	159
Lampiran 8 Tabel 4.19, Tabel 4.20, Tabel 4.21.....	160
Lampiran 9 Tabel 4.22, Tabel 4.23, Tabel 4.24.....	161
Lampiran 10 Tabel 4.25, Tabel 4.26, Tabel 4.27.....	162
Lampiran 11 Tabel 4.28, Tabel 4.29, Tabel 4.30 .....	163
Lampiran 12 Tabel 4.31, Tabel 4.32, Tabel 4.33.....	164
Lampiran 13 Tabel 4.34, Tabel 4.35, Tabel 4.36.....	165
Lampiran 14 Tabel 4.37, Tabel 4.38, Tabel 4.39.....	166

Tesis oleh Akira ini  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada hari Selasa, 27 Desember 2016

Bengkulu, 27 Desember 2016

Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris

**Dr. Slamet Widodo, S.E., M.S.**

NIP 19611221 198702 1 001

Anggota I

**Dr. Effed Darta Hadi, S.E., M.B.A**

NIP 19660530 199203 1 002

Anggota II

**Dr. Nurna Aziza, S.E., M.S. Ak.**

NIP 19760510 200003 2 001

**Dr. Fahrudin Js Pareke, SE., M.Si**

NIP 19710914 199903 1 004

**Mengetahui**

**Koordinator Program**

**Dr. Slamet Widodo, S.E., M.S.**

NIP 19611221 198702 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan

kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah diisyaratkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah beberapa tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Menurut Jumingan (2006:239) pengukuran Kinerja Keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran Kinerja Keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan sangat buruk.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan



penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan lebih sederhana untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara pemangku kepentingan akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan.

Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah,

diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu dengan cara menghitung *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah.

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Kabupaten Pemekaran yang ada di Provinsi Bengkulu dan dalam hal ini sedang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya yang menjadi objek penelitian ini dalam menganalisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah padatiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014. Permasalahan keuangan daerah yang dihadapi antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Penelitian terdahulu mengenai analisis kinerja keuangan daerah telah banyak dilakukan diantaranya oleh :Penelitian yang dilakukan oleh Zhufinsa (2011), Penelitian yang dilakukan oleh Gde dan Susanto (2010), Penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2011), Penelitian yang dilakukan oleh Oktavianus, Murni, Saerang.

Penelitian ini meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu dengan menganalisis Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu dengan cara menghitung *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. untuk melihat sejauh mana keberhasilan kinerja keuangan kedua kabupaten tersebut sebagai perbandingan atas kinerjanya.

Berdasarkan permasalahan di atas, tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010-2014"** (Studi pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja dan Rasio ketergantungan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2010 – 2014.
2. Bagaimanakah Perbandingan Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu diukur melalui *Share* dan *Growth* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peta Kemampuan Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2010 - 2014.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja dan Rasio ketergantungan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2014.
2. Untuk menilai Perbandingan Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu diukur melalui *Share* dan

*Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2010 - 2014.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja Pemerintah Daerah pada tiga Kabupaten Pemakaran Provinsi Bengkulu selama periode 5 tahun dari tahun 2010-2014, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode-periode berikutnya.

###### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah pada tiga Kabupaten Pemakaran Provinsi Bengkulu.

###### **3. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik.

###### **4. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung analisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Daerah pada tiga Kabupaten Pemakaran Provinsi Bengkulu dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

### **1.5. Pembatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tiga Kabupaten Pemakaran Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2010-2014. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada tiga Kabupaten Pemakaran Provinsi Bengkulu dilihat dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Sedangkan pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah pada tiga Kabupaten Pemakaran Provinsi Bengkulu dilihat dari hasil perhitungan *Share* dan *Growth* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peta Kemampuan Keuangan Daerah. Dari keseluruhan perhitungan dapat ditarik kesimpulan secara deskriptif berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tiga Kabupaten Pemakaran Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2010-2014.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan penting untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat Pemerintah Daerah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Tidak hanya itu, pengukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setaradengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud.

*Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuandan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik.



*Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

*Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2009: 19-21).

### **2.1.1. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja**

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ulum, (2009). antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara seimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

### **2.1.2. Manfaat Pengukuran Kinerja**

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ulum, (2009). antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara Objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara Objektif.

## **2.2. Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan merupakan salah satu alat penting dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi analisis laporan keuangan adalah laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Neraca atau Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- a) Aset tetap;
- b) Properti investasi;
- c) Aset tidak berwujud;
- d) Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h) dan (i));
- e) Investasi dengan menggunakan metode ekuitas;
- f) Aset biologik;
- g) Persediaan;
- h) Piutang dagang dan piutang lainnya;
- i) Kas dan setara kas;
- j) Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepas yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual;
- k) Utang dagang dan terutang lainnya;
- l) Kewajiban diestimasi;
- m) Laibilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l));
- n) Laibilitas dan aset untuk pajak kini;
- o) Laibilitas dan aset pajak tangguhan;
- p) Laibilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepas yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual;
- q) Kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan

r) Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2. Laporan laba rugi komprehensif.

Entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode:

- a. Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, atau
- b. Dalam bentuk dua laporan:
  - 1) Laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba rugi terpisah); dan
  - 2) Laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain (laporan pendapatan komprehensif)

Laporan laba rugi komprehensif, sekurang-kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut selama suatu periode:

- a. Pendapatan;
- b. Biaya keuangan;
- c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan *joint ventures* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
- d. Beban pajak;
- e. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
  - 1) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan
  - 2) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan;

- f. Laba rugi;
  - g. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifatnya (selain jumlah dalam huruf (h));
  - h. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan *joint ventures* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; dan i) Total laba rugi komprehensif.
3. Laporan perubahan ekuitas.

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a) Total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali;
  - b) Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif
  - c) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
    - 1) Laba rugi;
    - 2) Masing-masing pos pendapatan komprehensif; dan
    - 3) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.
4. Laporan arus kas.

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

5. Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Struktur catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu.
- b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
- c) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

6. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif disajikan akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi pospos laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen pokok laporan keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/

Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

### **2.2.1. Peranan Pelaporan Keuangan**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-

undangan. Suatu entitas pelaporan wajib melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### 2.2.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan pemanfaatan bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik dengan:



- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan serta hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Moh. Mahsun, dkk, 2011: 81, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2012), pada era orde lama terdapat pula definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong, 1962: 81, yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi. APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Pada era reformasi, bentuk dan susunan APBD mengalami dua kali perubahan. Pada awalnya, susunan APBD (berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1975) terdiri atas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. Anggaran Rutin dibagi menjadi Pendapatan dan Belanja Rutin, demikian pula Anggaran Pembangunan dibagi menjadi Pendapatan dan Belanja Pembangunan. Susunan tersebut kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada tahun 1984-1988. Dengan adanya peraturan tersebut, susunan dan bentuk APBD tidak lagi terbagi atas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan, namun terbagi menjadi Pendapatan dan Belanja. Pendapatan terbagi lagi menjadi

Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembangunan, dan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP), sedangkan belanja terbagi menjadi Belanja Rutin dan Pembangunan.

Perubahan kedua era pra reformasi pada tahun 1998 terjadi pada bagian pendapatan dari daerah. Jika pada bentuk sebelumnya pendapatan dari daerah terbagi menjadi empat, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu, Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan Sumbangan dan Bantuan, maka pada bentuk yang baru, Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Sumbangan dan Bantuan dimasukkan ke dalam satu bagian, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi.

Karakteristik APBD pada era pra reformasi adalah:

- 1) APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah (Pasal 30 UU Nomor 5 tahun 1975).
- 2) Pendekatan yang dipakai dalam menyusun anggaran adalah pendekatan *line-item* atas pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini, anggaran disusun berdasar jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas setiap pengeluaran.
- 3) Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasandan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada menteri dalam negeri untuk Pemda tingkat I dan kepada gubernur untuk Pemda tingkat II, jadi pertanggungjawaban bersifat vertikal.

- 4) Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/audit terhadap APBD bersifat pengawasan pendapatan dan pengeluaran daerah. Pengawasan tersebut tidak memperhitungkan pertanggungjawaban dari aspek lain, misalnya aspek kinerja.
- 5) Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundang-undang yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- 6) Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan *stelsel kameral* (tata buku anggaran). Menurut sistem pembukuan ini penyusunan anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan mempengaruhi. Karena tujuan pembukuan keuangan daerah di era pra reformasi adalah pembukuan pendapatan, maka tata buku yang lebih tepat untuk digunakan adalah *stelsel kameral*. Jika tujuan pembukuan keuangan daerah adalah pembukuan harta, maka tata buku yang tepat untuk digunakan adalah *stelsel komersial*. Pada *stelsel kameral*, diperolehnya pendapatan adalah pada saat penerimaan, sedangkan pembiayaan terjadi pada saat dilakukan pembayaran. Oleh karena itu, *stelsel kameral* ini juga disebut tata buku kas.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu, APBD dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era pra reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan

pinjamandari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatansebagai hak Pemerintah Daerah, sedangkan pinjaman belum tentumenjadi hak Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam APBD meungkinterdapat surplus atau defisit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasisurplus atau sumber penutupan defisit anggaran.

### **2.3.1. Proses Penyusunan APBD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prosespenyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahunanggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja PemerintahDaerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
- 2) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati denganDPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan RakyatDaerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untukdijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 3) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun RencanaKerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahunberikutnya.

- 4) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiraan belanja.
- 5) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- 6) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- 7) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD.
- 8) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- 9) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
- 10) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

### **2.3.2. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD antara lain:

1) Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
- b) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- d) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- e) Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- f) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2) Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
  - c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.
2. Dana Perimbangan
- Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber daridana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
  - b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
  - c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Penganggaran pendapatan daerah yang bersumberdari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sahmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS).
  2. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
  3. Penganggaran Dana Otonomi Khusus.
  4. Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID).
  5. Pendapatan yangdiperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangkamembiayai penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dankemasyarakatan.
  6. Penganggaran Dana Transfer lainnya.
  7. Penganggaran pendapatan kabupaten/ kota yangbersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yangditerima dari pemerintah provinsi



didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi.

8. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
9. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
10. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
11. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-

lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, Objek dan rincian Objek pendapatan Dana Darurat.

## **2.4. Belanja Daerah**

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

### **1. Belanja Langsung**

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Belanja Pegawai.**

Belanja Pegawai merupakan belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

#### **b. Belanja Barang dan Jasa.**

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

c. Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnyayang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- b. Belanja Bunga. Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangkapanjang.
- c. Belanja Subsidi. Belanja Subsidi merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Hibah merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja untuk

pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- e. Belanja Bagi Hasil Pajak. Belanja Bagi Hasil Pajak merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.
- g. Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## **2.5. Surplus/ Defisit APBD**

1. Penerimaan Pembiayaan, semua penerimaan yang ditujukan untuk menutup defisit APBD:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
  - f. Penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan, semua pengeluaran yang ditujukan untuk memanfaatkan surplus APBD:
- a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penerimaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
  - c. Pembayaran pokok utang; dan
  - d. Pemberian pinjaman daerah.

## 2.6. Analisis Laporan Keuangan

Fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tetapi tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan. Untuk membantu mengatasi ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut, maka perlu dibantu dengan Analisis Laporan Keuangan. Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. Untuk menganalisis laporan keuangan, maka diperlukan penguasaan terhadap:

- a. Cara menyusun laporan keuangan itu (proses akuntansi);

- b. Konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan atau akuntansi itu;
- c. Teknik analisisnya;
- d. Segmen, dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan ekonomibaik internasional maupun nasional.

Salah satu teknik untuk untuk melakukan Analisis LaporanKeuangan, yaitu dengan melakukan perhitungan Analisis Rasio Keuangan.

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan darisatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubunganyang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederharnakaninformasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan poslainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepathubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lainsehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.Penelitian ini hanya dibatasi pada perhitugan Rasio Keuangan terhadapLaporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2010-2014. Analisis Rasio Keuangan digunakan untukmenghitung Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan KemampuanKeuangan Daerah.

### **2.6.1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasiciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalamorganisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapaukuran kinerja, yaitu :

#### **2.6.1.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

**Rasio Kemandirian=**

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat/provisi dan pinjaman}} \times 100 \quad (2.1)$$

**Tabel 2.1.**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim, 2001 dalam Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.

- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

#### 2.6.1.2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010), derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (2.2)$$

**Tabel 2.2.**  
**Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Persentase PAD terhadap TPD %	Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto, 2010



### 2.6.1.3. Rasio Efektivitas

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasar Potensi Rill Daerah}} \times 100 \quad (2.3)$$

**Tabel 2.3.**  
**Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 - 99	Cukup Efektif
75 - 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2010

### 2.6.1.4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam

melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim2007:234) Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \quad (2.4)$$

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Persentase Efisiensi</b>
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Halim(2007)

#### **2.6.1.5. Rasio Keserasian Belanja**

Dalam Mahmudi (2010), Analisis Rasio Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat

distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan Analisis Kecerahan Belanja, antara lain:

**Rasio Belanja tidak Langsung terhadap Total Belanja=**

$$\frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \quad (2.5)$$

**Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja=**

$$\frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \quad (2.6)$$

Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan. Dilihat dari sudut pandang Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Belanja Tidak Langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan (*discretionary expense/expenditure*), sedangkan Belanja Langsung dikategorikan sebagai biaya teknik (*engineered expense/ expenditure*). Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan.

**2.6.1.6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD)**

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

Kategori dalam rasio ketergantungan sama dengan rasio kemandirian keuangan, dengan perhitungannya, Halim (2004).

**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD) =**

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \quad (2.7)$$

Dalam dwiranda (2007), kategori ketergantungan keuangan daerah otonom terlihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.5.**  
**Ketergantungan Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Ketergantungan ( % )</b>
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	> 25%-50%
Sedang	>50%-75%
Tinggi ( ketergantungan )	>75%-100%

Sumber : dwiranda (2007)

## **2.6.2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah**

### **2.6.2.1. Perhitungan dan Analisis *Share* dan *Growth***

Diawali dengan perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *Share* dan *Growth* kemudian mengklasifikasikan dengan Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran.

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \quad (2.8)$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\% \quad (2.9)$$

Keterangan:

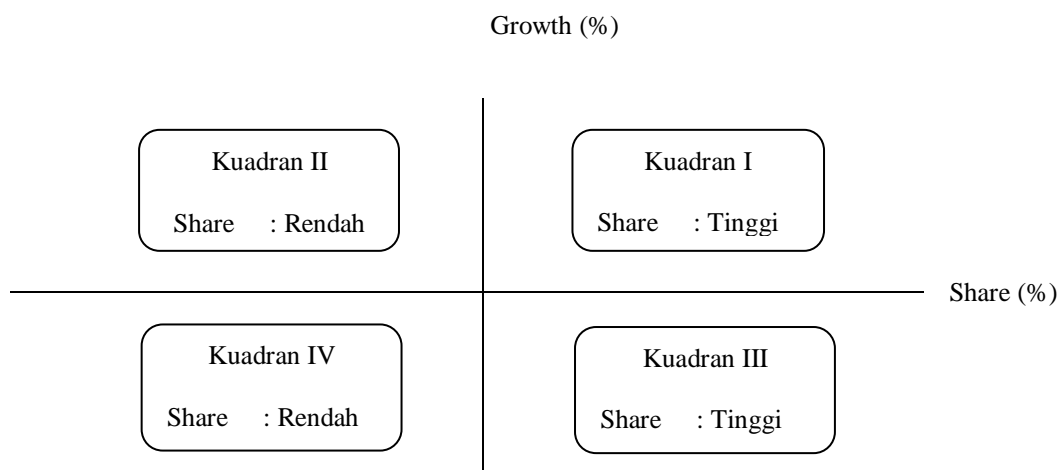
PAD<sub>i</sub> = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD<sub>i-1</sub> = Pendapatan Asli Daerah periode i-1 atau periode i sebelumnya

#### 2.6.2.2. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Peta Kemampuan Keuangan berdasarkan metode kuadran rata-rata *Share* dan *Growth* dan Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan metode kuadran seperti yang ditampilkan berikut ini :

Gambar 2.1. Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran Rata-rata *Share* (%) dan *Growth* (%)



Sumber : Bapenas 2003

**Tabel 2.6. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran**

KUADRAN	KONDISI
<b>I</b>	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah mempunyaikemampuan mengembangkan potensi lokal.Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.
<b>II</b>	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyaiepegembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam TotalBelanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan ( <i>growth</i> ) PAD tinggi.
<b>III</b>	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karenapertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi,namun pertumbuhan PAD rendah.
<b>IV</b>	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja,dan daerah belum mempunyai kemampuanmengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber : Bapenas 2003

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \quad (2.8)$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\% \quad (2.9)$$

Keterangan:

PAD<sub>i</sub> = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD<sub>i-1</sub> = Pendapatan Asli Daerah periode i-1 atau periode i sebelumnya

## 2.7. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zhufinsa, (2011) Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Kemandirian Pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih berada pada kemampuan keuangan yang rendah.
  - b. Dalam merealisasikan pendapatan daerahnya, Pemerintah Kota Bandung sudah dapat dikategorikan efektif dan efisien.
  - c. Berdasarkan perhitungan pada rasio aktivitas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih memprioritaskan anggarannya untuk mencukupi Belanja Rutin dibandingkan Belanja Pembangunan.
  - d. Menurut hasil perhitungan DSCR yang memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman adalah Tahun Anggaran 2006, dengan maksimal angsuran pokok pinjaman sebesar Rp 32.394.659.049,60. Sedangkan untuk Tahun Anggaran yang lain, tidak boleh meminjam lagi karena DSCR di bawah 2,5
  - e. Rasio Pertumbuhan PAD menunjukkan angka yang meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dengan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Kota Bandung selama Tahun Anggaran 2005-2009 yang mengalami kenaikan, yang kemudian akan mempengaruhi Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2006 sempat terjadi penurunan, namun pada 3 (tiga) Tahun Anggaran berikutnya mengalami peningkatan jumlah nominal belanja pembangunan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zhufinsa, (2011) terletak pada:

a. Analisis Rasio Keuangan yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi.

b. Periode waktu 5 (lima) tahun anggaran.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zhufinsa, (2011) terletak pada:

a. Penggunaan Rasio Pertumbuhan, *Debt Service Coverage Ratio*, dan Rasio Aktivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan pada penelitian Zhufinsa, (2011), tidak digunakan pada penelitian ini.

b. Penambahan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Keserasian Belanja, metode yang ditambahkan untuk mengukur Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah, yaitu diukur melalui *Share* dan *Growth* APBD, Peta Kemampuan Keuangan Daerah.

c. Studi kasus yang diteliti, yaitu Pemerintah Daerah Kab. Mukomukodengan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

d. Tahun Anggaran yang digunakan, yaitu 2005-2009 dengan 2010-2014.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gede dan Susanto (2010)

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah:

a. Berdasarkan Analisis Kinerja Keuangan Daerah, secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; Ketergantungan Keuangan Daerah sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah sangat kurang. Desentralisasi Fiskal



cukup. Efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

- b. Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum sumbangan PAD (*share*) terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTB TA 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Gede dan Susanto, (2010) terletak pada:

- a. Analisis Rasio Keuangan yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Efektivitas dan Efisiensi.
- b. Perhitungan Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah yang diukur melalui *Share* dan *Growth* APBD, Peta Kemampuan Keuangan Daerah.
- c. Periode waktu 5 (lima) tahun anggaran.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Gede dan Susanto, (2010) terletak pada:

Penggunaan Rasio Keserasian Belanja yang digunakan pada penelitian ini, tidak digunakan dalam penelitian Gede dan Susanto, (2010).

- a. Penggunaan Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang digunakan pada penelitian Gede dan Susanto, (2010), tidak digunakan pada penelitian ini.
- b. Studi kasus yang diteliti, yaitu Pemerintah Daerah Kota Kab. Mukomukodengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Tahun Anggaran yang digunakan, yaitu 2003-2007 dengan 2010-2014.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita, (2011)

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Kinerja Pemerintah Daerah Salatiga dikatakan baik, karena dikatakan efektif dan efisien.
- b. Pemerintah masih bergantung pada Pemerintah Pusat walaupun perkembangan kemandirian tinggi.
- c. Kemampuan PAD kurang untuk pengeluaran rutin.
- d. Rasio Keserasian belum stabil.
- e. Rasio Pertumbuhan Fluktuatif.
- f. Pada Analisis Upaya Fiskal terlihat bahwa elastisitas PAD dengan PDRB berpengaruh positif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Puspita, (2011) terletak pada Analisis Rasio Keuangan yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Puspita, (2011) terletak pada:

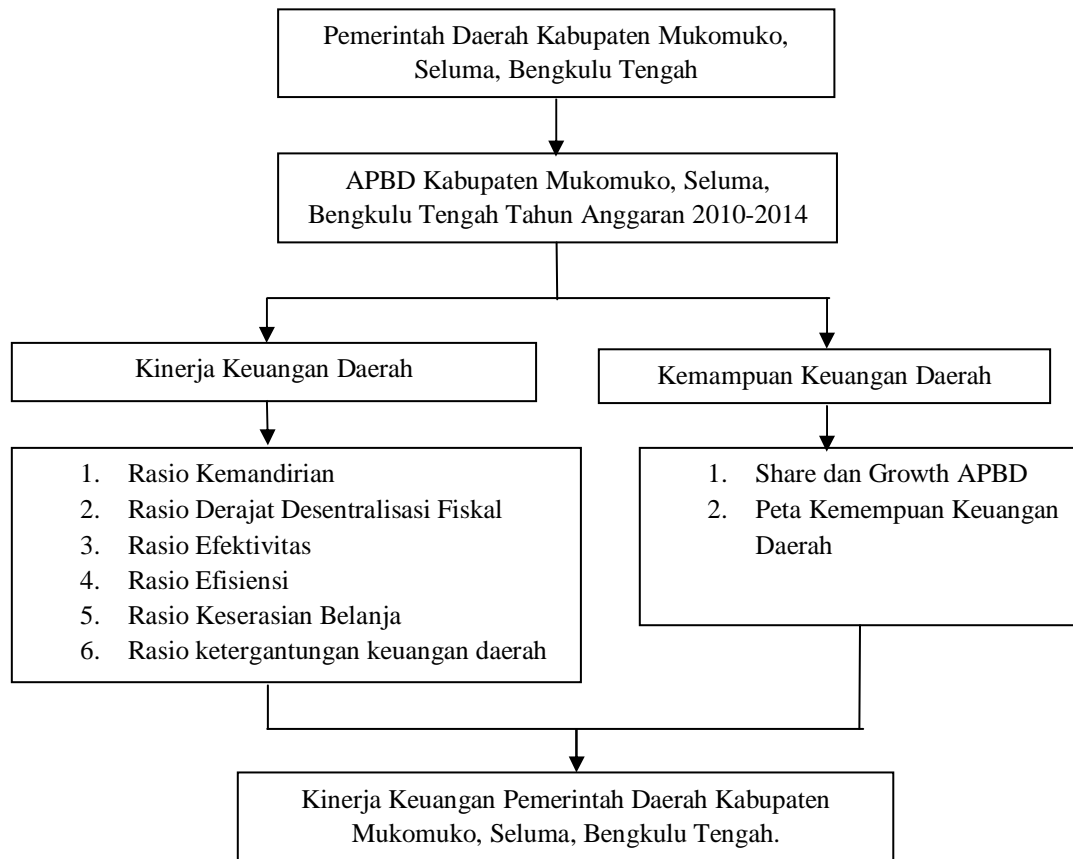
- a. Metode yang ditambahkan untuk mengukur Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah, yaitu diukur melalui *Share* dan *Growth* APBD, Peta Kemampuan Keuangan Daerah.
- b. Penggunaan Rasio Keserasian Belanja dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang digunakan pada penelitian ini, tidak digunakan dalam penelitian Wardhani Andita Puspita (2011).

- c. Penggunaan Analisis Rasio Kemandirian, Analisis Rasio Kemampuan Rutin, Analisis Rasio Keserasian, Analisis Rasio Kebutuhan Fiskal, Analisis Rasio Kapasitas Fiskal, dan Analisis Rasio Upaya Fiskal yang digunakan pada penelitian Puspita, (2011), tidak digunakan pada penelitian ini.
- d. Studi kasus yang diteliti, yaitu Pemerintah Daerah Kab. Mukomuko dengan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
- e. Tahun Anggaran yang digunakan, yaitu 2005-2010 dengan 2010-2014.
- f. Periode waktu 5 (lima) tahun anggaran dengan 6 (enam) tahun anggaran.

## **2.8. Kerangka Analisis**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Analisis rasio keuangan pada APBD pada tiga Kabupaten dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya selama 5 tahun dari tahun 2010-2014 sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2007:232). Beberapa analisis rasio keuangan dan kemampuan keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, *Share* dan *Growth* APBD, Peta Kemampuan Keuangan Daerah. Yang kemudian akan disimpulkan dengan cara melihat tabel perbandingan rasio-rasio dan kemampuan keuangan daerah pada

tiga Kabupaten dari setiap periode selama 5 (lima) tahun dari tahun anggaran 2010-2014 seperti terlihat pada gambar 2.2 Kerangka Analisis dibawah ini.



Gambar 2.2. Kerangka Analisis

### BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif Kuantitatif. Metode studi kasus (*case study*) adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, dimana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas (Yin,

1984a: 1984b, dalam Robert K. Yin, 2006: 18). Studi kasus dibatasi pada bukti kuantitatif.

Penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan hasil perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014. Kemudian ditarik kesimpulan berkenaan dengan Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu.

### **3.2. Definisi Operasional**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian, yang mencakup beberapa parameter berupa rasio keuangan daerah dan kemampuan keuangandaerah yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah Rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
3. Rasio efektivitas adalah Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

4. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.
5. Rasio Keserasian Belanja adalah untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan Analisis Keserasian Belanja, antara lain:

Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung :

- a. Rasio Belanja Tidak Langsung adalah menggambarkan perbandingan antara Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah.

Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan :

- b. Rasio Belanja Langsung adalah menggambarkan perbandingan antara Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah

6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah Rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin

besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah.

1) Kemampuan Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus

A. Peran/kontribusi pemerintah daerah dengan cara membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Belanja Daerah.

B. Pertumbuhan pemerintah daerah dengan cara membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu periode dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu periode dikurangi periode sebelumnya

2) Peta Kemampuan Keuangan Daerah adalah dengan menggunakan Metode Kuadran, berdasarkan pengelompokan Kuadran sebagai berikut:

Kuadran I = Share tinggi dan Growth tinggi.

Kuadran II = Share Rendah dan Growth tinggi.

Kuadran III = Share tinggi dan Growth Rendah.

Kuadran IV = Share Rendah dan Growth Rendah.

### **3.3. Metode Pengambilan Sampel**

Metode Sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai



teknik sampling yang digunakan diantaranya adalah probability sampling dan non probability sampling. Populasi adalah suatu wilayah generasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiono,2014:148).

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data langsung dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPPKAD, dan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data tersebut merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2014.

Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Selumadan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu dengan objek penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Tahun Anggaran 2010-2014 dan sampel dari penelitian ini pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tiga Kabupaten Pemekaran digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja dan Rasio ketergantungan keuangan daerah, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah.

#### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Keuangan pemerintah Daerah tiga Kabupaten Pematang Jaya Provinsi Bengkulu tahun Anggaran 2010-2014 yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Mukomuko, Bps, Depkeu. Data tersebut merupakan dokumentasi dari Laporan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Laporan Keuangan Daerah tiga Kabupaten Pematang Jaya Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2014.

#### **3.5. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan (Jonathan Sarwono, 2006: 138).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini antara lain :

- a. Menghitung rasio keuangan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan data yang diperoleh dengan membuat tabel.
- b. Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014, rumus-rumus yang digunakan antarlain:

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Kemandirian antarlain:

- a. Membuat tabel perkembangan APBD pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014
- b. Menghitung Rasio Kemandirian pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014 dengan menggunakan persamaan:

**Rasio Kemandirian=**

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman}} \times 100\% \quad (3.3)$$

**Tabel 3.1.**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim, 2001 dalam Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011

### 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu:

- a. Membuat tabel Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014.
- b. Menghitung Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014 dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (3.4)$$

**Tabel 3.2.**  
**Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal**

Persentase PAD terhadap TPD %	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam I dewa Gede Bisma dan Hery Susanto, 2010

### 3. Rasio Efektivitas

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Efektivitas yaitu:

- Membuat tabel biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dan realisasi penerimaan PAD pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014.
- Menghitung Rasio Efektivitas pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014 dengan menggunakan persamaan:

**Rasio Efektifitas =**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasar Potensi Rill Daerah}} \times 100\% \quad (3.5)$$

**Tabel 3.3.**  
**Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif

100	Efektif
90 - 99	Cukup Efektif
75 - 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2010

#### 4. Rasio Efisiensi

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Efisiensi yaitu:

- Membuat table realisasi Penerimaan PAD dan target PenerimaanPADpada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi BengkuluTahun Anggaran 2010-2014.
- Menghitung Rasio Efisiensi pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi BengkuluTahun Anggaran 2010-2014 dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (3.6)$$

**Tabel 3.4.**  
**Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

Persentase Kinerja Keuangan %	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurangdari60%	Sangat Efisien

Sumber: Halim(2007)

#### 5. Rasio Keserasian Belanja

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Keserasian Belanjaantara lain:

- Membuat tabel Total Belanja Langsung, Total Belanja TidakLangsung, dan Total Belanja Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi BengkuluTahun Anggaran 2010-2014

- b. Menghitung Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014 dengan persamaan:

**Rasio Belanja tidak Langsung terhadap Total Belanja=**

$$\frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (3.7)$$

**Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja=**

$$\frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (3.8)$$

## 6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Membuat tabel Pendapatan Transfer dan Total Pendapatan Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014.
- b. Menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014 dengan menggunakan persamaan:

Kategori dalam rasio ketergantungan sama dengan rasio kemandirian keuangan, dengan perhitungannya, Halim (2004).

**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \quad (3.9)$$

Dalam dwiranda (2007), kategori ketergantungan keuangan daerah otonom terlihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5.**  
**Ketergantungan Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Ketergantungan ( % )</b>
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	> 25%-50%
Sedang	>50%-75%
Tinggi ( ketergantungan )	>75%-100%

Sumber : dwiranda (2007)

## 7. Perhitungan *Share* dan *Growth*

Langkah-langkah dalam menganalisis *Share* dan *Growth* sebagai berikut:

- Membuat tabel Indeks Elastisitas Belanja Langsung terhadap PAD, Indeks Pertumbuhan PAD, dan Indeks Peran PAD pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014.
- Menghitung *Share* dan *Growth* pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014 dengan persamaan:

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \quad (3.10)$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\% \quad (3.11)$$

Keterangan:

PAD<sub>i</sub> = Realisasi Penerimaan PAD tahun Sekarang (tahun i)

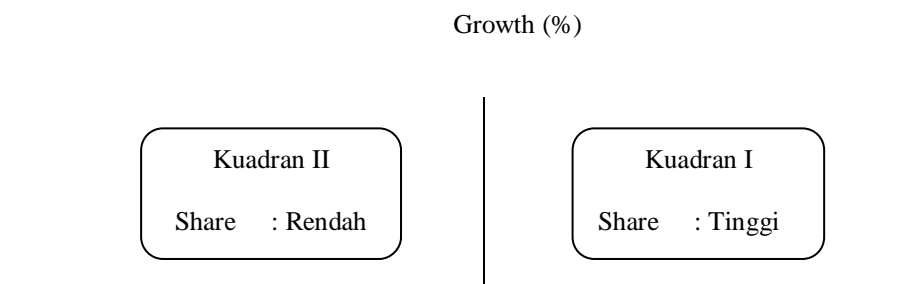
$PADi-1 = \text{Realisasi Penerimaan PAD tahun Sebelumnya (tahun } i-1)$

## 8. Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah

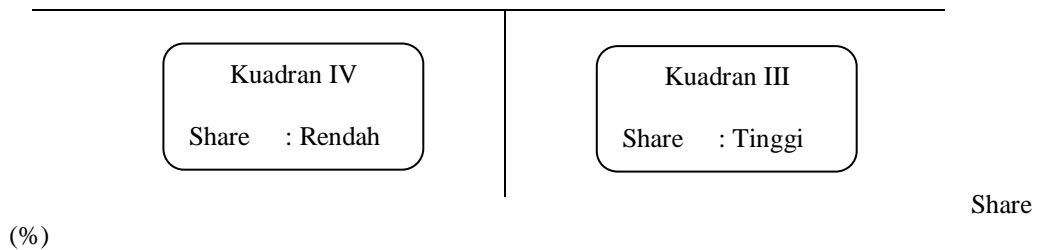
Langkah-langkah dalam menganalisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan hasil perhitungan *Share* dan *Growth* kuadran daerah tersebut dengan menggunakan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014.
- b. Mendeskripsikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014.

Gambar 3.1. Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran Rata-rata *Share* (%) dan *Growth* (%)







Sember : Bapenas 2003

**Tabel 3.6 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran**

KUADRAN	KONDISI
<b>I</b>	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.
<b>II</b>	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan ( <i>growth</i> ) PAD tinggi.
<b>III</b>	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
<b>IV</b>	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah.

Sember : Bapenas 2003.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

Ini menjelaskan hasil-hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Penjelasan hasil penelitian ini mulai dari gambaran umum Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu objek penelitian dan deskripsi data Penelitian.

#### **4.1.1. Gambaran Umum Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu**

Subbab ini menggambarkan tentang gambaran umum Kinerja Keuangan pada tiga Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu Pada Tanggal 25 Februari 2003 oleh Presiden RI Megawati Sukarno Putri dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu Pada Tanggal 21 Juli 2008 Oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Terkait hal ini analisa dilakukan terhadap realisasi kinerja keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (2010-2014).

Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bab VIII yang mengatur tentang Keuangan Daerah; pasal 157) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Bagian Kedua tentang Struktur APBD dalam pasal 20 pada ayat 1 disebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah lebih lanjut disebutkan dalam pasal 21 – 28 (PP No. 58 Tahun 2005) bahwa:

1. Pendapatan daerah terdiri atas; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  - c. Pendapatan asli daerah terdiri atas; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
  - d. Pendapatan Dana Perimbangan meliputi; Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
2. Belanja daerah diklasifikasi menurut jenis belanja terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; belanja modal dan belanja tidak terduga.
3. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
  - a. Penerimaan pembiayaan mencakup; SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman

- b. Pengeluaran pembiayaan mencakup; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.
- c. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- d. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

#### **4.1.1.1. Deskripsi Penerimaan Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran**

Deskripsi penerimaan daerah pada tiga Kabupaten pemekaran ini akan membahas tentang : Deskripsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Deskripsi tentang pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan, Deskripsi tentang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Deskripsi tentang Penerimaan Total Daerah yang ditampilkan pada Tabel 4.1 Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu berikut ini.

**Tabel 4.1 PENERIMAAN DAERAH TA 2010 – 2014 3(TIGA) KABUPATEN PEMEKARAN**  
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kab. Mukomuko					Kab.Seluma					Kab. Bengkulu Tengah				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Pendapatan</b>	<b>413.124</b>	<b>442.776</b>	<b>448.090</b>	<b>576.615</b>	<b>648.402</b>	<b>383.165</b>	<b>490.057</b>	<b>472.169</b>	<b>544.429</b>	<b>616.193</b>	<b>281.351</b>	<b>393.055</b>	<b>400.453</b>	<b>470.128</b>	<b>513.350</b>
<b>PAD</b>	<b>25.789</b>	<b>20.000</b>	<b>17.500</b>	<b>27.334</b>	<b>36.259</b>	<b>12.465</b>	<b>8.492</b>	<b>7.622</b>	<b>8.531</b>	<b>15.616</b>	<b>2.563</b>	<b>3.790</b>	<b>6.568</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>
Pajak daerah	3.322	5.045	4.000	7.279	10.314	5.858	3.162	3.364	4.248	8.230	900	721	2.270	2.595	4.235
Retribusi daerah	11.678	9.955	5.980	7.555	5.795	1.182	1.107	973	1.033	1.335	777	1.389	1.135	1.310	1.801
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(28.000)	1.620	2.000	2.500	1.800	1.500	1.500	1.500	1.000	1.343	29	29	-		500
Lain-lain PAD yang sah	10.789	3.380	5.520	10.000	18.350	3.926	2.724	1.785	2.250	4.708	857	1.651	3.163	3.095	2.465
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>347.242</b>	<b>358.894</b>	<b>406.156</b>	<b>506.918</b>	<b>558.529</b>	<b>338.018</b>	<b>347.189</b>	<b>424.840</b>	<b>482.742</b>	<b>539.306</b>	<b>266.288</b>	<b>328.856</b>	<b>352.885</b>	<b>421.628</b>	<b>464.252</b>
DBH	63.000	42.042	28.000	38.863	38.153	44.893	21.494	24.776	25.155	24.502	14.000	20.000	27.246	30.000	32.000
DAU	249.927	282.109	338.203	404.398	454.993	257.751	287.335	349.783	397.725	444.699	208.428	250.161	288.875	330.694	379.670
DAK	34.315	34.742	39.952	63.658	65.382	35.374	38.360	50.281	59.862	70.105	43.860	58.695	36.764	60.934	52.582
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>40.094</b>	<b>63.882</b>	<b>24.435</b>	<b>42.363</b>	<b>53.614</b>	<b>32.682</b>	<b>134.376</b>	<b>39.707</b>	<b>53.157</b>	<b>61.272</b>	<b>12.500</b>	<b>60.498</b>	<b>41.000</b>	<b>41.500</b>	<b>40.098</b>
Hibah	-	-	-			-	-	-			5.000	-	-		
Dana darurat	-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	6.000	9.000	10.000	15.000	18.473	12.970		11.700	11.700	20.100	2.500	3.500	10.000	12.000	10.000
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	34.094	54.882	13.700	26.163	32.167	14.000	12.971	28.007	41.457	41.172	(39.000)	17.908	11.000	25.000	27.000
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	(1.200)		734		2.974	5.711	121405	-			5.000	-	-	2.500	3.098
Lain-lain	-	-	-	1.200		-	-	-			39.000	39.000	20.000	2.000	

### **A. Deskripsi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan dari Tabel 4.1 Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Pendapatan Asli Daerah yang dicapai Pemerintah Kabupaten Mukomuko selama 5 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang bersifat fluktuatif. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 dan tahun 2012 ini menunjukkan angka penurunan yang relatif besar dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang relatif cukup besar yakni sebesar Rp. 9.834.000.000, pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan meskipun peningkatannya tidak sebesar tahun 2013. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 hanya sebesar 33% namun pada tahun 2013 adalah sebesar 56%. Penurunan pendapatan asli daerah ini terjadi dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah untuk menggali potensi daerahnya baik dari sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Apabila pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang telah terlaksana secara maksimal sesuai dengan target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mukomuko, maka dengan sendirinya penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.

Sama halnya dengan Kabupaten Mukomuko, penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seluma juga belum dilakukan maksimal. Hal ini terlihat dari penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 dan tahun 2012 yang cukup tinggi yakni 32% pada tahun 2011 dan 10% pada tahun 2012. Akan tetapi pada tahun 2013 penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD pada daerah ini cenderung meningkat sebesar 21% yaitu sebesar Rp. 909.000.000,. Pada tahun 2014 peningkatan ini terus terjadi dengan

peningkatan yang cukup besar (83%), yaitu pendapatan asli daerah ini naik sebesar Rp. Rp 7.085.000.000,. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Seluma ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengelola pendapatan asli daerah dengan maksimal.

Berbeda halnya dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hanya saja peningkatannya yang tidak menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Hal ini terlihat pendapatan asli daerah pada tahun 2011, 2013 dan 2014 peningkatan relatif lebih kecil. Berbeda dengan peningkatan pada tahun 2012 pertumbuhan pendapatan asli daerah relatif lebih besar. Hal ini terlihat bahwa peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2012 naik sebesar 73% yaitu sebesar Rp. 2.778.000.000,- sedangkan pada tahun 2013 hanya meningkat sebesar Rp 432.000.000,- dan pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp 2.001.000.000,-. Kondisi ini memperlihatkan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilakukan secara maksimal dan pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun.

Bila dilihat dari pengelolaan pendapatan asli daerah dari ketiga daerah kabupaten pemekaran tersebut terlihat bahwa Kabupaten Mukomuko memiliki pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Jika dilihat dari peningkatan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah, Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan sumber pendapatan asli daerah yang cenderung memiliki peningkatan yang positif dari waktu ke waktu. Hal ini memperlihatkan bahwa

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah cenderung memiliki potensi untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya secara baik. Namun, pada Kabupaten Seluma pengelolaan pendapatan asli daerahnya relatif masih berfluktuasi meskipun ada peningkatan yang cukup besar.

## **B. Deskripsi tentang Pendapatan yang Berasal dari Dana Perimbangan**

Berdasarkan Tabel 4.1 Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dana Perimbangan ini merupakan Dana transfer pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini menunjukkan tentang kemandirian dan ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap bantuan pusat/provinsi masih sangat besar.

Pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan tonggak pergeseran paradigma terhadap APBD. Pergeseran paradigma tersebut meliputi berbagai hal berikut:

- a. Pergeseran teknis, meliputi; struktur anggaran, orientasi anggaran, disiplin anggaran (rutin dan pembangunan), dan duplikasi anggaran (belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga, biaya operasional vs biaya rutin, serta uang representasi dan uang sidang).



- b. Pergeseran konseptual mencakup; dinamika tuntutan masyarakat (akuntabilitas dan transparansi), efisiensi dan efektivitas sumber daya daerah, peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maupun pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang mempunyai tujuan utama untuk mengatasi ketimpangan keuangan yang terjadi baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar daerah sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, dana perimbangan daerah dapat dibedakan menjadi:

- a. Bagi hasil dimaksudkan untuk mengatasi masalah ketimpangan *vertikal* (antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan penghasil pemerintah daerah, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam.
- b. DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- c. DAK merupakan transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) untuk memenuh pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan/atau kepentingan nasional.

Selain dana perimbangan dari pemerintah pusat, terdapat pula Dana Otsus yang dikelola oleh pemerintah provinsi yang didistribusikan sebagai dana transfer dari pemerintah serta Dana Bagi Hasil Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan dibagikan ke Kabupaten/Kota.

Selama tahun 2010-2014, pendapatan dana perimbangan pada ketiga kabupaten pemekaran menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hanya saja peningkatannya berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pada Kabupaten Mukomuko terlihat pada tahun 2011, pendapatan dana perimbangan meningkat sebesar 3,36% yaitu meningkat sebesar Rp 11.651.000.000,-. Pada tahun 2012 dan 2013 peningkatan pendapatan dana perimbangan cenderung lebih besar yakni sebesar 13,17% pada tahun 2012 dan 24,81% pada tahun 2013. Sementara pada tahun 2014 peningkatan hanya sebesar 10,18. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dana perimbangan di Kabupaten Mukomuko relatif meningkat selama 5 tahun terakhir ini, hanya saja peningkatan berfluktuasi.

Sementara pendapatan dana perimbangan di Kabupaten Seluma juga mengalami peningkatan yang sama seperti di Kabupaten Mukomuko. Pada tahun 2011 peningkatan pendapatan dana perimbangan meningkat sebesar 2,71% dan pada tahun 2012 meningkat cukup besar yakni sebesar 22,36% atau sebesar Rp. 77.641.000.000,-. Namun pada tahun 2013 dan tahun 2014 peningkatan pendapatan dana perimbangan cenderung mengalami penurunan, pendapatan dana perimbangan tahun 2013 adalah sebesar 13,63 dan pada tahun 2014 turun kembali yakni peningkatannya hanya sebesar 11,72%. Peningkatan tersebut secara riil adalah sebesar Rp 57.912.000.000,- pada tahun 2013 dan Rp 56.564.000.000,- pada tahun 2014. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan dana perimbangan di Kabupaten Seluma relatif berfluktuasi selama tahun 2010-2014.

Sama halnya pada dua Kabupaten Pemekaran yang telah dikemukakan di atas, pendapatan dana perimbangan di Kabupaten Bengkulu Tengah juga

mengalami peningkatan selama tahun 2010-2014. Hanya saja peningkatan pada tahun 2011 cenderung lebih tinggi dari tahun 2012 s/d tahun 2014, yakni sebesar 23,5%. Namun pada tahun 2012 peningkatannya relatif lebih kecil yakni hanya sebesar 7,31% atau senilai Rp 24.029.000.000,- dan pada tahun 2013 pendapatan dana perimbangan tersebut meningkat kembali sebesar 19,41% atau senilai Rp 68.502.000.000,-. Sementara pada tahun 2014 peningkatan pendapatan dana perimbangan tersebut cenderung turun kembali. Dalam halmana angka peningkatannya tersebut hanya sebesar 10,17% atau senilai Rp. 42.865.000.000,-. Hal ini memperlihatkan bahwa fluktuasi peningkatan dana perimbangan di Kabupaten Bengkulu Tengah relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan dua kabupaten yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisa di atas, terlihat bahwa penerimaan dana perimbangan di Kabupaten Mukomuko relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Dan selanjutnya, Penerimaan dana perimbangan di Kabupaten Seluma selama lima tahun tersebut memperlihatkan pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.

### **C.Deskripsi tentang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Berdasarkan Tabel 4.1 Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Mukomuko dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang bersumber dari Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya, kecuali pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 39.448.000.000,- atau turun sebesar 61,75%. Dimana penurunan ini berasal dari

Dana penyesuaian dan otonomi khusus yakni turun sebesar Rp. 41.182.000.000,-. Akan tetapi, pada tahun 2013 pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah ini mengalami peningkatan sebesar 73,4% atau meningkat sebesar Rp. 17.929.000.000,-. Namun pada tahun 2014 peningkatan pendapatan ini menurun menjadi hanya sebesar 26,6% atau sebesar Rp. 11.251.000.000,-.

Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Seluma selama periode anggaran tahun 2010-2014 juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 94.669.000.000,- (turun sebesar 94,7%) dimana penurunan ini dikarenakan tidak ada Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah ini memperlihatkan peningkatan, yakni meningkat sebesar 33,9% pada tahun 2013 dan 15,3% pada tahun 2014. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah adalah relatif cukup berfluktuasi selama 5 tahun tersebut.

Sementara pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah untuk Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada periode tahun anggaran 2010-2014 mengalami penurunan yang cukup berfluktuasi. Dalam hal mana tahun 2011 pendapatan yang berasal dari pos ini meningkat sebesar Rp 47.908.000.000,-. Namun pada tahun 2012, pendapatan pada pos ini mengalami penurunan sebesar 32,13% atau sebesar Rp. 19.408.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi peningkatan kembali hanya sebesar 1,22%. Akan tetapi pada tahun 2014, pendapatan dari pos ini

mengalami penurunan kembali sebesar 3,38% atau turun sebesar Rp. 1.402.000.000,-.

#### **D.Deskripsi tentang Penerimaan Total Daerah**

Berdasarkan Tabel 4.1 Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu terlihat bahwa penerimaan total pada tiga kabupaten pemekaran terjadi pertumbuhan yang relatif meningkat selama tahun 2010-2014. Namun besaran peningkatan yang terjadi setiap tahunnya selama 5 tahun tersebut tidak stabil dan persentasenya turun naik.

Pada Kabupaten Mukomuko terlihat bahwa pada tahun 2011 penerimaan daerah ini meningkat sebesar 7,2% namun pada tahun 2012 pendapatan hanya naik sebesar 1,2%. Akan tetapi pada tahun 2013, pendapatan daerah ini meningkat cukup besar yakni sebesar 28,7% atau senilai Rp. 128.527.000.000. Namun pada tahun 2014, peningkatan pendapatnya turun kembali yakni hanya sebesar 12,6% dengan nilainya sebesar Rp 71.785.000.000. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerimaan pendapatan daerah ini relatif tidak stabil. Meskipun pendapatan daerah meningkat akan tetapi peningkatannya tidak menunjukkan peningkatan yang konstan.

Sementara pada Kabupaten Seluma, penerimaan atas pendapatan daerah ini tidak jauh berbeda kondisinya dengan Kabupaten Mukomuko. Bahkan kondisinya lebih tidak stabil. Hal ini ditunjukkan tingkat fluktuasi turun naik peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang relatif tinggi. Hal ini ditunjukkan, pada tahun 2010 pendapatan daerah meningkat sebesar 27,9% atau

senilai Rp. 106.893.000.000,- namun pada tahun 2012 penerimaan daerah turun sebesar Rp 17.899.000.000,- atau turun sebesar 3,65%. Akan tetapi penerimaan daerah ini meningkat kembali pada tahun 2013 dan tahun 2014. Namun peningkatan selama 2 tahun tersebut menunjukkan penurunan persentasenya, pada tahun 2013 meningkat sebesar 15,3% atau senilai Rp. 72.761.000.000,- namun pada tahun 2014 peningkatan penerimaan daerah ini hanya mencapai 13,2% atau senilai Rp 71.764.000.000,-. Dari kondisi ini terlihat bahwa meskipun pendapatan daerah Kabupaten Seluma cenderung meningkat namun besaran peningkatan tidak konstan. Hal ini terlihat dari fluktuasi persentase peningkatan yang terlihat turun naik setiap tahunnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa optimalisasi sumber penerimaan daerah belum optimal, terutama pendapatan yang berasal dari sumber PAD.

Pada Kabupaten Bengkulu Tengah, penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2010-2014 juga memperlihatkan peningkatan namun besaran peningkatan yang terjadi juga bersifat tidak stabil. Hal ini terlihat, pada tahun 2011 peningkatan penerimaan daerah naik sebesar 39,7% atau senilai Rp. 111.703.000.000,- namun pada tahun 2012 peningkatan penerimaan hanya tumbuh sebesar 1,9% atau senilai Rp 7.399.000.000,-. Sementara pada tahun 2013, penerimaan daerah meningkat kembali sebesar Rp. 69.434.000.000,- atau naik sebesar 17,3%. Demikian pula, penerimaan daerah ini juga mengalami peningkatan pada tahun 2014 namun persentase peningkatannya relatif lebih rendah dari tahun 2013, yakni hanya meningkat sebesar 9,3% atau naik sebesar Rp 43.464.000.000,-.

Pada ketiga kabupaten pemekaran tersebut terlihat bahwa penerimaan pendapatan total daerah menunjukkan peningkatan dari tahun 2010-2014. Hanya saja persentase peningkatannya tidak stabil atau turun naik setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan daerah Mukomuko lebih baik bila dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya. Bahkan di Kabupaten Seluma peningkatan cenderung lebih tidak stabil. Hal ini ditunjukkan adanya pertumbuhan yang menurun pada tahun 2012, Sementara pada kabupaten Bengkulu Tengah memperlihatkan pertumbuhan yang meningkat dari 2010-2014.

Dapat disimpulkan bahwa total penerimaan pendapatan daerah dari 3 Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu secara rata-rata penerimaan daerahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut sebagian besar berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana DAU, DBH, DAK sedangkan Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari dana Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah masing-masing daerah masih tergolong kecil jika dibandingkan dari penerimaan yang berasal dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **4.1.1.2 Deskripsi Belanja Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran**

Deskripsi Belanja Daerah pada tiga Kabupaten pemekaran ini akan membahas tentang : Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes, belanja bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes, belanja tidak terduga. dan

Belanja Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang ditampilkan pada Tabel 4.2 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu berikut ini.



**Tabel 4.2 BELANJA DAERAH TA 2010 - 2014 3 (TIGA) KABUPATEN PEMEKARAN**  
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kab. Mukomuko					Kab. Seluma					Kab. Benteng				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Belanja</b>	<b>359.661</b>	<b>419.983</b>	<b>603.539</b>	<b>699.898</b>	<b>653.902</b>	<b>408.851</b>	<b>503.835</b>	<b>478.238</b>	<b>631.847</b>	<b>665.394</b>	<b>287.571</b>	<b>432.603</b>	<b>417.402</b>	<b>478.861</b>	<b>520.350</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>182.522</b>	<b>219.816</b>	<b>230.515</b>	<b>246.465</b>	<b>281.366</b>	<b>260.433</b>	<b>270.453</b>	<b>279.480</b>	<b>318.360</b>	<b>313.027</b>	<b>164.893</b>	<b>219.139</b>	<b>222.119</b>	<b>237.913</b>	<b>259.089</b>
Belanja Pegawai	135.154	179.359	192.884	213.661	245.626	203.456	237.253	261.260	292.815	303.421	130.309	177.961	192.882	209.861	233.439
Belanja Bunga	5.000	3.000	5.000	6.500	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	12.994	5.277	4.160	2.799	3.660	43.216	8.740	7.190	13.883	1.300	23.474	19.159	10.658	5.585	5.000
Belanja Bantuan sosial	2.525	4.800	5.750	450	2.000	5.190	3.160	2.065	3.845	4.666	2.195	8.521	3.440	4.583	3.000
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	850	850	-	-	175	(2.039)	18.300	-	-	-	10	250	300	300	-
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	23.000	23.530	19.721	21.055	21.905	6.562	3.000	7.465	1.725	2.039	7.905	9.566	11.786	14.583	14.650
Belanja tidak terduga	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000	2.008	-	1.500	6.091	1.600	1.000	3.682	3.053	3.000	3.000
<b>Belanja Langsung</b>	<b>177.139</b>	<b>200.167</b>	<b>373.025</b>	<b>453.433</b>	<b>372.536</b>	<b>148.419</b>	<b>233.382</b>	<b>198.757</b>	<b>313.488</b>	<b>352.368</b>	<b>122.678</b>	<b>213.464</b>	<b>195.283</b>	<b>240.948</b>	<b>261.261</b>
Belanja Pegawai	44.971	48.834	64.370	74.993	69.778	18.882	19.441	18.697	38.316	24.047	17.125	21.750	31.928	37.944	35.334
Belanja Barang dan jasa	47.404	68.353	75.016	105.721	129.940	42.603	63.782	42.255	98.087	131.788	36.590	67.039	84.107	84.574	106.849
Belanja Modal	84.763	82.979	233.638	272.719	172.818	86.934	150.159	137.805	177.085	196.533	68.962	124.675	79.248	118.430	119.078

Dari Tabel 4.2 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu dapat diketahui bahwa Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2010-2014 menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali terjadi penurunan Belanja Daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 45.995.000.000,- atau turun sebesar 6,6%. Untuk kenaikan Belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp. 183.557.000,-. Atau naik sebesar 43,7% dan pada tahun 2013 peningkatan belanja terjadi sebesar 16% atau senilai Rp. 96.359.000.000,-.

Peningkatan belanja daerah Kabupaten Mukomuko terutama terjadi pada peningkatan belanja tidak langsung. Peningkatan pada belanja tidak langsung terjadi dikarenakan besarnya belanja pegawai. Belanja pegawai pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 135.154.000.000,- dan meningkat menjadi sebesar Rp. 245.626.000.000,- pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pegawai selalu terjadi dari tahun ke tahun. Sama halnya dengan Belanja Langsung yang menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Komponen belanja langsung yang mengalami peningkatan terjadi pada seluruh komponen yang ada yakni pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Penurunan belanja langsung hanya terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 80.897.000.000,- atau sebesar 23,4%. Penurunan belanja ini terjadi dikarenakan adanya penurunan pada belanja pegawai dan belanja modal yang cukup signifikan.

Belanja Daerah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2010-2014 terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan. Penurunan Belanja Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp. 25.597.000.000,- atau sebesar 5,1%. Untuk kenaikan Belanja daerah

tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar Rp.153.609.000.000,-. Atau sebesar 32,1%.

Peningkatan belanja pada Kabupaten Seluma terutama disebabkan oleh peningkatan belanja tidak langsung. Peningkatan belanja tidak langsung tersebut terjadi dikarenakan besarnya belanja pegawai. Belanja pegawai tersebut meningkat secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dalam kurun 5 tahun observasi. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa belanja pegawai di Kabupaten Seluma pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 203.456.000.000,- dan meningkat menjadi Rp. 303.421.000.000,- pada tahun 2014.

Berbeda halnya dengan Belanja Langsung, di Kabupaten Seluma belanja pada komponen ini menunjukkan kenaikan dari tahun ketahun, kecuali pada tahun 2012 terjadi penurunan yaitu sebesar Rp. 34.625.000.000,- atau sebesar 34,63% dibandingkan dari angka tahun 2011. Komponen yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada belanja langsung di Kabupaten Seluma adalah terjadi pada belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Pengeluaran atau belanja daerah yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah selama tahun anggaran 2010-2014 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pengeluaran pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar Rp. 15.201.000.000,- atau sebesar 5,1%. Secara komponen, pengeluaran untuk Belanja Tidak Langsung menunjukkan kenaikan dari tahun ketahun selama tahun 2010-2014. Peningkatan Belanja Tidak Langsung secara linier terjadi karena adanya peningkatan Belanja Pegawai. dalam halmana belanja pegawai tersebut pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 130.309.000.000,- dan meningkat menjadi sebesar Rp. 233.439.000.000,- pada tahun 2014. Dalam halmana peningkatan ini

hampir dua pertiga kali dari nilai pengeluaran pada tahun 2010. Berbeda dengan Belanja Langsung yang menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun selama tahun 2010-2014, namun penurunan hanya terjadi pada tahun 2012 yakni dengan nilai sebesar Rp.18.181.000.000,- atau terjadi penurunan sebesar 8,5%. Komponen pengeluaran terbesar yang terjadi pada belanja langsung adalah pada belanja modal.

Pada Tabel 4.2 tentang belanja daerah dapat disimpulkan bahwa belanja daerah pada tiga kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu selama tahun 2010-2014 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan belanja daerah yang digunakan masing-masing daerah pemekaran adalah untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja pegawai, Belanja hibah, Belanja bantuan keuangan. Belanja tersebut juga digunakan untuk belanja langsung yang terdiri dari Belanja modal, Belanja barang dan jasa, Belanja pegawai.

Data-data yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah tiga kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu adalah Realisasi APBD Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang terdiri dari Penerimaan Daerah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian data tersebut digunakan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja dan Rasio ketergantungan keuangan daerah, Perhitungan *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah.

Perbandingan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu dengan cara menghitung *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu. dari data tersebut dapat diketahui Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014. Adapun hasil dari analisis perbandingan tersebut adalah seperti yang berikut ini:

#### 4.1.2. Hasil Perhitungan Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan 3 Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu

##### 4.1.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan bantuan bagian Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel Perbandingan Rasio Kemandirian pada tiga Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu adalah seperti tampak pada Tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4.3**  
**Perbandingan Rasio Kemandirian Pada Tiga Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014**

Nama Daerah	Tahun Anggaran					Rata-Rata	Kriteria
	2010	2011	2012	2013	2014		
Mukomuko	7,42%	5,57%	4,27%	4,89%	6,46%	5,72%	Instruktif
Seluma	3,68%	2,44%	1,79%	1,76%	2,89%	2,51%	Instruktif
Benteng	0,96%	1,15%	1,86%	1,66%	1,93%	1,51%	Instruktif

Sumber : laporan Realisasi APBD Kab. Benteng (Data diolah)

##### A. Rasio Kemandiran Keuangan Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan Tabel 4.3 Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko selama tahun 2010-2014 dapat dikemukakan sebagai berikut. Pada tahun 2010 rasio kemandirian daerah ini adalah sebesar 7,42% dan pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 1,85% yakni menjadi 5,57%. Sementara pada tahun 2012 terjadi penurunan kembali yakni sebesar 1,30% atau menjadi 4,27%. Namun pada tahun 2013 rasio keuangan daerah

ini terjadi peningkatan sebesar 0,62% menjadi yaitu 4,89% dan pada tahun 2014 peningkatan kembali terjadi, yakni sebesar 1,57% atau rasio kemandirian keuangannya menjadi 6,46%.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan di Kabupaten Mukomuko selama tahun anggaran 2010–2014 terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup bervariasi. Penurunan rasio kemandirian keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,85%. Sementara kenaikan rasio kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,57%. Berdasarkan nilai rasio kemandirannya, kenaikan nilai rasio tertinggi terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 7,42% dan rasio terendah terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 4,27%. Secara nilai rata-rata, rasio kemandirian di Kabupaten Mukomuko adalah sebesar 5,72%. Tingginya fluktuasi yang terjadi atas rasio kemandirian keuangan di Kabupaten Mukomuko adalah disebabkan oleh fluktuasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang juga mengalami kenaikan dan penurunan selama tahun 2010-2014. Disisi lain nilai dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan selama tahun 2010-2014. Tidakselarasnya peningkatan dana perimbangan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Mukomuko menyebabkan nilai rasio kemandirian daerah ini tidak stabil.

Bila dilihat lebih jauh, berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian tergambar bahwa rasio kemandirian Kabupaten Mukomuko tergolong masih “Rendah Sekali”. Hal ini dikarenakan nilai rasio tersebut berada pada kategori persentase antara 0% - 25%. Nilai kategori ini dapat dikatakan memiliki pola hubungan Instruktif. Dalam

halmana hubungan yang sedemikian memiliki makna bahwa peran pemerintah pusat sebagai sumber belanja daerah lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko belum mampu melaksanakan fungsi otonomi daerahnya secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui mengapa perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian tergambar bahwa rasio kemandirian Kabupaten Mukomuko tergolong masih “Rendah Sekali” dengan pola hubungan Instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih sangat kurang. Ini mengandung makna bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mukomuko masih sangat kurang.

Hal ini dikarenakan rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi, sumber Pendapatan Asli Daerah belum dikelola dengan secara maksimal dan disisi lain kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.

## **B. Rasio Kemandiran Keuangan Kabupaten Seluma**

Berdasarkan Tabel 4,3 diketahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di lihat dari Rasio Kemandirian selama tahun 2010-2014 secara rata-rata memperlihatkan angka yang rendah dibandingkan dengan Kabupaten Mukomuko. Secara menyeluruh selama 5 tahun observasi, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Seluma sangat berfluktuasi. Dalam halmana semenjak tahun 2010 hinggann tahun 2013, kemandirian keuangan daerah ini



relatif mengalami penurunan secara berkelanjutan dan baru pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 64,2%.

Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Seluma tahun anggaran 2010 – 2014 terlihat bahwa hasil perhitungan terjadi kenaikan dan penurunan yang sangat fluktuatif. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 1,24% dan kenaikan terjadi pada tahun 2014 sebesar 1,13%. Sedangkan Rasio Kemandirian tertinggi terdapat pada tahun 2010 sebesar 3,68% pada tahun 2010 dan nilai kemandirian terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,76%. Secara rata – rata Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Seluma adalah sebesar 2,51%.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui mengapa kinerja keuangan Kabupaten Seluma berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian, Kabupaten Seluma tergolong “rendah sekali” dan berada pada kelas interval antara 0% - 25%. Nilai kemandirian keuangan yang masuk pada katagori ini termasuk pada pola “hubungan Instruktif”. Makna dari pola hubungan instruktif adalah bahwa peran pemerintah pusat sebagai sumber keuangan daerah lebih dominan dari pada pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah belum mampu melaksanakan perannya sebagai daerah otonomi secara maksimal.

Hal ini disebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak stabil dan memperlihatkan kondisi naik turun dan disisi lain Dana Perimbangan dari pemerintah pusat selama periode 2010 - 2014 cenderung mengalami kenaikan.

### **C. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah**

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bengkulu

Tengah memperlihatkan angka yang turun naik secara berkelanjutan selama periode tahun 2010-2014. Secara rata-rata nilai rasio kemandirian keuangan daerah ini adalah yang paling rendah dibandingkan dengan dua kabupaten pemekaran lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu.

Pada tahun 2010 terlihat bahwa rasio kemadiraian keuangan Kabupaten Bangkulu Tengah adalah 0,96% dan pada tahun 2011 naik menjadi 1,15%. Pada tahun 2012 naik kembali menjadi 1,86%, namun pada tahun 2013 tingkat kemandirian keuangannya turun kembali menjadi 1,66%. Kemudian pada tahun 2014, tingkat kemandirian keuangan daerah ini meningkat kembali menjadi 1,93%. Meskipun pada tahun 2014 mengalami peningkatan namun nilai rasio kemadirian keuanga daerah ini masih berada pada posisi yang rendah dibandingkan pada periode tahun 2010.

Kenaikan tertinggi Rasio Kemandirian Kabupaten Bengkulu Tengah selama periode tahun anggaran 2010 – 2014 terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 0,74% dan pada tahun 2013 terjadi penurunan tertinggi sebesar 0,20%. Rasio Kemandirian Keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 1,93% dan rasio kemandirian terendah terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 0,96%. Secara rata – rata Rasio Kemandirian Keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebesar 1,51%.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui mengapa perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan hasil perhitunganselama tahun 2010 – 2014 Rasio Kemandirian Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong pada katagori “Rendah Sekali” yakni berada pada katagori antara 0% - 25%. Dengan demikian, pola hubungan

kemandirian keuangan daerah ini masuk dalam katagori pola “hubungan Instruktif”. Dalam halmana, pola hubungan ini menggambarkan bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah belum mampu melaksanakan pengelolaan otonomi daerah secara maksimal.

Keberadaan kemandirian keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah pada posisi terendah lebih dikarenakan daerah ini melakukan pemekaran pada tahun 2008 sehingga pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) belum dapat dilakukan secara maksimal. Disisi lain, sebagai Kabupaten Bengkulu Tengah baru penataan SDM dan implementasi kebijakan APBD belum optimal sehingga penataan keuangan daerah belum dapat dilakukan secara maksimal.

Analisa diatas, dapat diketahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah pada tiga kabupaten pemekaran Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian. Jika dibandingkan Rasio Kemandirian dari tiga Kabupaten pemekaran tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Mukomuko memiliki Rasio Kemandirian yang paling tinggi yaitu sebesar 5,72%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Seluma dengan nilai rasio kemandirian keuangan sebesar 2,51%. Sementara rasio Kemandirian terendah didapat oleh Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sebesar 1,51%.

Dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian ketigakabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu berada pada katagori “rendah sekali”. Dalam halmana ketiga daerah kabupaten tersebut tingkat kemandiriannya berada pada kelompok antara

0% - 25%. Nilai pada kelompok ini menunjukkan bahwa pola hubungan kemandirian keuangan daerah pada ketiga kabupaten pemekaran ini berada pada pola hubungn “instruktif”. Hal ini mengandung makna bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tiga kabupaten pemekaran masih sangat rendah atau dengan kata lain dukungan dana dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama dalam mendanai belanja daerah pada ketiga daerah kabupaten tersebut.

Rendahnya rasio kemandirian pada tiga kabupaten pemekaran Provinsi Bengkulu ini dikarenakan rendahnya pendapatan asli daerah pada ketiga kabupaten pemekaran yang berasal dari sektor pajak dan retribusi yang belum dikelola secara maksimal, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yang selalu mengalami peningkatan yang mengakibatkan tidak selarasnya antara dana perimbangan dan pendapatan asli daerah.

#### **4.1.2.2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara perolehan PAD dengan Total Penerimaan Daerah. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat dalam Tabel 4.4 tentang Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tiga Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pada Tiga Kabupaten**  
**Pemekarandi Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014**

Nama Daerah	Tahun Anggaran					Rata-Rata	Kriteria
	2010	2011	2012	2013	2014		
Mukomuko	6,24%	4,51%	3,78%	4,24%	5,38%	4,83%	Sangat Kurang
Seluma	3,25%	1,73%	1,61%	1,56%	2,53%	2,14%	Sangat Kurang
Benteng	0,73%	0,85%	1,35%	1,25%	1,41%	1,12%	Sangat Kurang

Sumber : laporan Realisasi APBD Kab. Benteng (Data diolah)

#### **A. Rasio Derajat Desentrali Fiskal Kabupaten Mukomuko**

Berdasarkan Tabel 4.4 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko selama tahun 2010 – 2014 menunjukkan nilai yang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Secara menyeluruh nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten Mukomuko selama periode 5 tahun tersebut berada pada katagori “sangat kurang” yang ditandai dengan nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Mukomuko berada pada katagori antara 00,00% - 10,00% . Hal ini menandakan masih besarnya tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Mukomuko kepada pemerintah pusat yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan sendiri relatif masih sangat kurang.

Bila dilihat dari tahun 2010-2014, dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko ditinjau dari sisi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup bervariasi. Pada tahun 2010 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Mukomuko adalah

sebesar 6,24% namun pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,73% yakni menjadi 4,51%. Pada tahun 2012 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tersebut kembali mengalami penurunan sebesar 0,73% yakni menjadi 3,78%. Dan pada tahun 2013 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,46% atau menjadi sebesar 4,24%. Selanjutnya pada tahun 2014 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tersebut kembali mengalami kenaikan sebesar 1,14% atau menjadi sebesar 5,38%.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Mukomuko selama tahun anggaran 2010 – 2014 pada uraian tersebut diatas diketahui sangat berfluktuasi. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 1,73% dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 1,14%. Sedangkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 6,24% dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terendah terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 3,78%.

Secara rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Mukomuko adalah sebesar 4,83%. Nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Mukomuko masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat. Dengan kata lain sumber keuangan yang berasal dari kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah masih sangat kurang.

## **B. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Seluma**

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten Seluma selama tahun 2010-2014 memperlihatkan nilai yang cenderung turun dari waktu ke waktu dan hanya pada tahun 2014 kenaikan terjadi. Secara rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

di kabupaten Seluma adalah sebesar 2,14%. Nilai ini memperlihatkan bahwa Rasio desentralisasi fiskal di kabupaten ini masih “sangat kurang”. Dalam hal mana kondisi ini ditunjukkan oleh nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal kabupaten Seluma berada pada katagori antara 00,00% - 10,00%. Hal ini menandakan masih besarnya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Seluma terhadap pemerintah pusat.

Bila dilihat secara mendalam, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada tahun 2010 memperlihatkan nilai yang tinggi yakni 3,25% dan merupakan nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tertinggi selama 5 tahun tersebut. Namun pada tahun 2011 hingga tahun 2013, nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal daerah ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Dimanapada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,52% yakni menjadi sebesar 1,73% dan pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan sebesar 0,12% atau menjadi sebesar 1.61%. Dan pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali yakni sebesar 0,05% atau menjadi sebesar 1,56%. Namun pada tahun 2014 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Seluma mengalami kenaikan yakni sebesar 0,97% atau menjadi sebesar 2,53%.

### **C. Rasio Derajat Desentrali Fiskal Kabupaten Bengkulu Tengah**

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah selama tahun 2010-2014 secara rata-rata memperlihatkan nilai yang rendah yakni sebesar 1.12%, Nilai ini berada pada katagori “sangat kurang” yakni berada pada katagori antara 00,00% - 10,00%. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang berada pada katagori ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki tingkat ketergantungan keuangan

yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Dengan kata lain sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil.

Pekembangan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bengkulu Tengah selama tahun 2010 – 2013 memperlihatkan nilai yang meningkat meskipun nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tersebut masih sangat rendah. Dimana pada tahun 2010 nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sebesar 0,73% dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,12% yakni menjadi sebesar 0,85%. Dan pada tahun 2012 rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tersebut mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 0,50% atau menjadi sebesar 1,35%. Namun pada tahun 2013 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami penurunan sebesar 0,10% yakni turun menjadi 1,25%. Akan tetapi pada tahun 2014 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tersebut mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 0,16% atau menjadi sebesar 1,41%.

Melihat dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal mengalami kenaikan dari tahun ketahun kecuali pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,10%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,50%, sedangkan nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 1,41% dan nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 0,73%.

Berdasarkan perhitungan perbandingan pada Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan berdasarkan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada ketiga daerah kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu



bila dibandingkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dari ketiga Kabupaten pemekaran tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Mukomuko memiliki nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang lebih tinggi dari dua kabupaten pemekaran lainnya, yaitu dengan nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 4,83%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Seluma yakni dengan nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 2,14%. Sementara nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terendah terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu dengan nilai sebesar 1,12%.

Ketiga kabupaten pemekaran ini bila dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada pada kategori “Sangat Kurang” yaitu berada pada kelompok kategori antara 00,00% - 10,00%. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah masih memiliki tingkat ketergantungan pendanaan yang tinggi dari pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini terlihat dari besarnya total pendapatan daerah yang diterima oleh masing – masing daerah Kabupaten pemekaran tersebut dari pemerintah pusat/provinsi. Sementara penerimaan yang bersumber dari PAD masing – masing daerah pemekaran masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

Kondisi seperti ini dikarenakan kurangnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri, besarnya penerimaan dari dana perimbangan yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana DAU (Dana Alokasi Umum) dana DBH ((Dana Bagi Hasil), Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari dana penyesuaian otonomi khusus, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya.

#### 4.1.2.3. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun hasil perhitungan atas rasio Efektifitas Keuangan pada tiga kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 4, yakni tentang Perbandingan Rasio Efektivitas Tiga Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Perbandingan Efektivitas Pada Tiga Kabupaten Pemekaran**  
**di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014**

Nama Daerah	Tahun Anggaran					Rata-Rata	Kriteria
	2010	2011	2012	2013	2014		
Mukomuko	96,25%	94,54%	99,44%	96,07%	98,87%	97,39%	Cukup Efektif
Seluma	100%	79,75%	106,95%	94,94%	105,54%	104,73%	Sangat Efektif
Benteng	64,48%	98,94%	100,01%	100%	121,62%	97,09%	Cukup Efektif

Sumber : laporan Realisasi APBD Kab. Benteng (Data diolah)

#### A. Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan Tabel 4.5 Rasio Efektifitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko selama Tahun Anggaran 2010-2014, dapat dilihat bahwa Rasio Efektifitas Keuangan mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi dari waktu ke waktu. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2010 adalah nilai rasio efektifitas keuangannya adalah sebesar 96,25% dan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,71% yakni menjadi sebesar 94,54%. Kemudian pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 4,90% atau menjadi sebesar

99,44%. Dan pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali yakni sebesar 3,37% atau menjadi sebesar 96,07%. Namun pada tahun 2014 nilai rasio efektivitas keuangan Kabupaten Mukomuko kembali mengalami kenaikan sebesar 2,80% atau menjadi sebesar 98,87%.

Bila dilihat lebih jauh Rasio Efektifitas Keuangan Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2010 – 2014 mengalami kondisi yang berfluktuasi. Dimana, penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 3,37% dan kenaikan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 4,90%. Sedangkan Rasio Efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni dengan nilai Rasio Efektivitas sebesar 99,44%. Sementara nilai rasio efektivitas terendah terjadi pada tahun 2011 yakni dengan nilai sebesar 94,54%.

Secara rata-rata nilai Rasio Efektifitas Kabupaten Mukomuko adalah sebesar 97,39%. Nilai Rasio Efektifitas Kabupaten Mukomuko sebesar tersebut masuk dalam kriteria “Cukup Efektif”. Nilai tersebut pada katagori antara 90,00% - 99,00%. Hasil dengan nilai rasio efektivitas yang sedemikian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mukomuko belum mampu memenuhi pencapaian target PAD yang telah ditetapkan.

## **B. Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten Seluma**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di lihat dari Rasio Efektifitas Keuangannya selama tahun 2010 – 2014 memperlihatkan pencapaian yang cukup bervariasi. Secara rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan di Kabupaten Seluma berada pada katagori “Sangat Efektif”. Hal ini tergambar bahwa realisasi pencapaian target PAD secara rata-rata mencapai rasio 104,73%. Nilai rasio ini mencapai nilai melebihi 100% sehingga pencapaian rasio

efektivitas keuangan di Kabupaten Seluma tergolong sangat tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma telah mengoptimalkan sumber penerimaan daerahnya. Dalam hal mana realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan.

Bila dilihat lebih jauh, Rasio efektivitas keuangan di Kabupaten Seluma selama tahun 2010-2014 tergambar bahwa pada tahun 2010 pencapaian realisasi PAD-nya adalah sebesar 100%. Kemudian pada tahun 2011 rasio efektivitas keuangannya mengalami penurunan sebesar 20,25% yakni menjadi sebesar 79,75%. Namun pada tahun 2012 nilai rasio tersebut mengalami peningkatan kembali yakni naik sebesar 27,20% atau menjadi sebesar 106,95%. Akan tetapi pada tahun 2013, rasio efektivitas keuangan tersebut mengalami penurunankembali yakni sebesar 12,01%. Dan pada tahun 2014 nilai rasio tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,60% menjadi sebesar 105,54%.

Pencapaian target penerimaan PAD di atas, memperlihatkan bahwa pengelolaan pencapaian target penerimaan daerah yang bersumber dari PAD di kabupaten Seluma belum stabil. Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa penurunan penerimaan target PAD tertinggi di Kabupaten Seluma terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 20,25% dan kenaikan penerimaan target PAD tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 27,20%. Dalam halmana, Rasio Efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 106,95% dan Rasio Efektifitas terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 79,75%.

### **C. Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah**

Berdasarkan hasil perhitungan, selama tahun 2010 – 2014, rasio efektivitas keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan nilai yang cenderung naik.

Meskipun terjadi penurunan nilai rasio, yakni pada tahun 2012, namun penurunan tersebut sangat kecil sekali yakni hanya 0,01%. Akan tetapi, nilai rasio efektifitas keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan angka peningkatan namun secara rata-rata pencapaian nilai rasio tersebut hanya 97,09%. Pencapaian nilai ini masuk pada katagori :Cukup Efektif” yakni berada pada rentang antara 90,00% - 99,00%. Hal ini menggambarkan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum mampu mengoptimalikan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di lihat dari Rasio Efektifitasdapat dikemukakan bahwa pada tahun 2010 rasio efektivitas keuangannya adalah sebesar 64,48%. Nilai rasio ini memperlihatkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengelola PAD-nya masih sangat lemah. Namun pada tahun 2011, rasio eketivitas keuangannya mengalami kenaikan sebesar 34,46% yaitu menjadi sebesar 98,94%. Dan pada tahun 2012, rasio tersebut terus mengalami kenaikan kembali sebesar 1,07% atau menjadi sebesar 100,01%. Namun pada tahun 2013, rasio efektivitas tersebut mengalami penurunan kembali. Akan tetapi nilai penurunan rasio tersebut sangat kecil yakni sebesar 0,01%. Kemudian pada tahun 2014 rasio eketivitas tersebut mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 21,62% atau menjadi sebesar 121,62%.

Bila dikaji lebih jauh, rasio efektifitas Kabupaten Bengkulu Tengah selama tahun 2010-2014 memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 34,46%. Sedangkan

Rasio efektifitas tertinggi terdapat pada tahun 2014 yakni sebesar 121,62% dan rasio efektifitas terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 64,48%.

Berdasarkan analisa diatas dapat diketahui bahwa hasil Rasio Efektifitas Keuangan pada tiga kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu menunjukkan hasil yang baik. Jika dibandingkan rasio efektifitas ketiga kabupaten pemekaran ini didapatkan hasil sebagai berikut : rasio efektifitas tertinggi pada Kabupaten Seluma sebesar 104,73% kemudian diikuti Kabupaten Mukomuko sebesar 97,39% dan terendah pada Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 97,09%. Nilai rasio efektifitas pada Kabupaten Seluma masuk pada kriteria Sangat Efektif nilai tersebut pada kategori diatas 100%, ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Seluma sudah mampu memenuhi pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut masuk dalam kriteria "Cukup Efektif". Nilai tersebut pada katagori antara 90,00% - 99,00%. Hasil dengan nilai rasio efektifitas yang sedemikian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah cukup mampu memenuhi pencapaian target PAD yang telah ditetapkan.

#### **4.1.2.4. Rasio Efisiensi**

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh setiap daerah. Kriteria penilaiannya adalah semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Adapun hasil perhitungan atas rasio efisiensi ini dapat dilihat dalam Tabel 4.6 yakni tentang Perbandingan Rasio Efisiensi tiga Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu sebagai berikut.

**Tabel 4.6**  
**Perbandingan Efisiensi Pada Tiga Kabupaten Pemekaran**  
**di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014**

Nama Daerah	Tahun Anggaran					Rata-Rata	Kriteria
	2010	2011	2012	2013	2014		
Mukomuko	87,05%	99,33%	134,69%	121,38%	100,84%	108,66%	Tidak Efisien
Seluma	106,70%	102,81%	101,28%	116,05%	107,98%	106,96%	Tidak Efisien
Benteng	102,21%	110,06%	104,23%	101,85%	101,36%	103,94%	Tidak Efisien

Sumber : laporan Realisasi APBD Kab. Benteng (Data diolah)

#### **A. Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Mukomuko**

Berdasarkan Tabel 4.6 Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Mukomuko Tahun Anggaran 2010-2014, dapat dilihat bahwa Kinerja Rasio Efisiensi pada tahun 2010 sebesar adalah 87,05% dan pada tahun 2011 rasio tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,28% atau menjadi sebesar 99,33%. Selanjutnya rasio efisiensi tersebut pada tahun 2012 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 35,36%. Namun, pada tahun 2013 rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 13,31% menjadi sebesar 121,38% pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan kembali sebesar 20,54% dan nilai rasio menjadi 100,84%.

Diketahui bahwa Rasio Efisiensi Keuangan di Kabupaten Mukomuko selama tahun anggaran 2010 – 2014 terjadi fluktuasi. Dari hasil analisa data terlihat bahwa penurunan rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 20,54%. Akan tetapi kenaikan rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 35,36%. Sementara rasio efisiensi tertinggi terdapat pada tahun 2012 sebesar 134,69% dan rasio efisiensi terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 87,05%.

Secara rata-rata Rasio Efisiensi pada Kabupaten Mukomuko adalah sebesar 108,66%. Nilai rasio ini masuk pada katagori “tidak efisien”. Hal ini mengandung

makna bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Mukomuko lebih besar dari pada pendapatannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi belanja Kabupaten Mukomuko melebihi pendapatan yang diperolehnya.

## **B. Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Seluma**

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa rasio efisiensi keuangan di Kabupaten Seluma selama tahun 2010 – 2014 memperlihatkan nilai yang berfluktuasi. Selama 5 tahun masa pengamatan ini terlihat sepanjang tahun nilai rasio efisiensinya memperoleh kriteria “tidak efisien”. Hal ini dikarenakan tingkat belanja daerah ini melebihi 100% selama 5 tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja di Kabupaten Seluma melebihi pendapatan yang diterimanya.

Bila dicermati Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di lihat dari Rasio Efisiensi pada tahun 2010 nilainya mencapai 106,70%. Kemudian pada tahun 2011 nilai rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 3,89% dan pada tahun 2012 penurunan rasio efisiensi kembali terjadi yakni sebesar 1,53%. Namun pada tahun 2013, rasio efisiensi keuangan kembali mengalami kenaikan sebesar 14,77%. Akan tetapi pada tahun 2014 penurunan rasio tersebut kembali mengalami penurunan sebesar 8,07% atau menjadi sebesar 107,98%.

Rasio Efisiensi keuangan pada Kabupaten Seluma selama tahun anggaran 2010 – 2014 dari uraian tersebut diatas tergambar bahwa terjadi kenaikan dan penurunan yang bervariasi. Penurunan rasio efisien tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,07% dan kenaikan rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 14,77%. Disisi lain, Rasio Efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 116,05% dan rasio efisiensi terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 101,28%. Secara rata-rata Rasio Efisiensi di Kabupaten Seluma adalah



sebesar 106,96%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah lebih besar dari pada pendapatannya.

### **C. Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah**

Berdasarkan Tabel 4.6, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dilihat dari Rasio Efisiensi selama tahun 2010-2014 menunjukkan nilai yang tinggi. Nilai ini menggambarkan bahwa rasio efisien keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah berada pada kategori “tidak efisien” selama 5 tahun pengamatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa realisasi belanja Kabupaten Bengkulu Tengah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi pendapatannya.

Secara detil rasio efisiensi pada Kabupaten Bengkulu Tengah tergambar bahwa pada 2010 nilai rasio ini adalah sebesar 102,21% dan pada tahun 2011 rasio tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,85%. Kemudian pada tahun 2012 rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 5,83% atau menjadi sebesar 104,23% dan pada tahun 2013 nilai rasio tersebut mengalami penurunan kembalinya sebesar 2,38%. Selanjutnya, pada tahun 2014 rasio tersebut mengalami penurunan kembali sebesar 0,49% atau menjadi sebesar 101,36%.

Rasio Efisiensi Kabupaten Bengkulu Tengah selama tahun 2010 – 2014 terjadi fluktuasi. Pada tahun 2012 rasio efisiensi di kabupaten ini mengalami penurunan tertinggi sebesar 5,83% dan kemudian mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 7,85%. Sementara itu, Rasio Efisiensi tertinggi pada kabupaten ini terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 110,06% dan rasio efisiensi terendah terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 101,36%.

Secara rata-rata Rasio Efisiensi pada Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai nilai adalah sebesar 103,94%. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa kategori belanja daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah berada pada tingkat “Tidak Efisien”. Hal ini mengisyaratkan bahwa belanja daerah selama 5 tahun observasi berada dalam kondisi dimana pengeluaran daerah lebih besar dari pendapatannya. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum dilakukan secara baik.

Apabila dibandingkan Rasio Efisiensi pada ketigakabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu tergolong dalam kriteria “tidak efisien”. Hal ini dikarenakan rasio tersebut berada pada kategori diatas 100%. Bila dilihat lebih jauh, Rasio Efisiensi pada tigakabupaten pemekaran tersebut dapat dikemukakan bahwa rasio efisiensi pada pemerintah Kabupaten Mukomuko lebih tinggi persentasenya Rasio Efisiensi yaitu sebesar 108,66%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Seluma sebesar 106,96% dan Rasio Kemendirian terendah didapat oleh Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sebesar 103,95%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengelola belanjanya belum dilaksanakan secara efisien. Dimana pengeluaran atau belanja yang dilakukan melebihi dari pendapatan yang diperolehnya.

#### **4.1.2.5. Rasio Keserasian Belanja**

Analisis Rasio Keserasian Belanja ditujukan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antar belanja yang dilakukan pemerintah. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan

Analisis Keserasian Belanja. Adapun hasil perhitungan rasio keserasian pada ketiga Kabupaten Pemebaran di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 berikut ini.

**Tabel 4.7**  
**Perbandingan Keserasian Belanja Tidak Langsung Pada Tiga Kabupaten Pemebaran di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014**

Nama Daerah	Tahun Anggaran					Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	
Mukomuko	50,74%	52,33%	38,19%	35,21%	43,02%	43,90%
Seluma	63,69%	53,67%	58,43%	50,38%	47,04%	54,64%
Benteng	57,33%	50,65%	53,21%	49,68%	49,79%	52,13%

Sumber : laporan Realisasi APBD Kab. Benteng (Data diolah)

Tabel 4.7 menggambarkan tentang rangkuman hasil perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung di ketiga Kabupaten Pemebaran di Provinsi Bengkulu. Sementara Tabel 4,8 menggambarkan tentang rangkuman hasil perhitungan Rasio Belanja Langsung di ketiga Kabupaten Pemebaran di Provinsi Bengkulu.

**Tabel 4.8**  
**Perbandingan Keserasian Belanja Langsung Pada Tiga Kabupaten Pemebaran di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014**

Nama Daerah	Tahun Anggaran					Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	
Mukomuko	49,25%	47,66%	61,80%	64,78%	56,97%	56,09%
Seluma	36,30%	46,32%	41,56%	49,61%	52,95%	45,35%
Benteng	42,66%	49,34%	46,78%	50,31%	50,20%	47,86%

Sumber : laporan Realisasi APBD Kab. Benteng (Data diolah)

#### **A. Rasio Keserasian Belanja Kabupaten Mukomuko**

Berdasarkan Tabel 4.7 kinerja Rasio dapat dilihat bahwa Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung pada tahun 2010 adalah sebesar 50,74% dan mengalami peningkatan sebesar 1,59% pada tahun 2011 yakni menjadi 52,33%. Namun pada

tahun 2012 rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 14,14% atau nilai rasionya menjadi sebesar 38,19%. Kemudian pada tahun 2013 rasio tersebut terus mengalami penurunan yakni sebesar 2,98% atau menjadi menjadi sebesar 35,21%. Dan pada tahun 2014 rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mukomukokembali mengalami kenaikan sebesar 7,81% dan nilai rasio tersebut naik menjadi sebesar 43,02%.

Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2010 – 2014 dilihat dari uraian diatas terjadi variasi kenaikan dan penurunan. Selama periode 2010 – 2014 terlihat bahwa fluktuasi rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mukomuko masih cukup tinggi. Penurunan tertinggi Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung di daerah ini terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 14,14% dan kenaikan tertinggi rasio keserasian tersebut terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,81%. Sementara itu, Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni dengan nilai sebesar 52,33% dan nilai rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung yang terendah trerjadi pada tahun 2013 yakni dengan nilai sebesar 35,21%. Secara rata-rata Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Mukomuko adalah adalah mencapai nilai sebesar 43,90%.

Berdasarkan Tabel 4.8 Rasio Keserasian Belanja Langsung Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dapat dilihat dari bahwa pada tahun 2010 nilai rasio keserasian belanja langsung adalah mencapai nilai sebesar 49,25%. Namun pada tahun 2011 nilai rasio keserasian mengalami penurunan sebesar 1,59% yakni turun menjadi sebesar 47,66%. Akan tetapi pada tahun 2012, nilai rasio tersebut mengalami kenaikan kembali sebesar 14,14% sehingga nilai rasionya

menjadi 61,80%. Dan pada tahun 2013, nilai rasio keserasian belanja langsung tersebut terus mengalami kenaikan kembali sebesar 2,98% dan nilainya naik menjadi sebesar 64,78%. Namun pada tahun 2014, nilai rasio keserasian belanja langsung di Kabupaten Mukomuko mengalami penurunan kembali sebesar 7,81% sehingga nilai rasio keserasian belanja langsung tersebut berubah menjadi 56,97%.

Bila dianalisa lebih jauh, Rasio Keserasian Belanja Langsung di Kabupaten Mukomuko pada tahun anggaran 2010 – 2014 memperlihatkan kondisi yang tidak stabil, yakni terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup bervariasi. Penurunan rasio keserasian belanja langsung terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 7,81%, sementara kenaikan tertinggi untuk rasio keserasian belanja langsung terjadi pada tahun 2012 yakni dengan nilai rasio sebesar 14,14%. Sementara Rasio itu, bila dilihat dari nilai Keserasian Belanja Langsung tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni dengan nilai rasio sebesar 64,78%. Disisi lain nilai rasio keserasian belanja langsung terendah terjadi pada tahun 2011 yakni dengan nilai sebesar 47,66%. Dan pada akhirnya bila dilihat secara rata-rata, selama 5 tahun pengamatan maka nilai Rasio Keserasian Belanja Langsung yang terjadi di Kabupaten Mukomuko adalah sebesar 56,09%.

## **B. Rasio Keserasian Belanja Kabupaten Seluma**

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas ditunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di lihat dari Rasio Kesarian Belanja Tidak Langsung terjadi kenaikan dan penurunan yang bervariasi selama tahun 2010 – 2014. Dari hasil analisa data tergambar bahwa pada tahun 2010 nilai rasio keserasian belanja tidak langsung mencapai nilai sebesar 63,69%. Namun pada tahun 2011, rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 10,02% yakni menjadi

sebesar 58,43%. Dan pada tahun 2012, nilai rasio tersebut mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 4,76%. Akan tetapi pada tahun 2013, rasio keserasian belanja tidak langsung tersebut mengalami penurunan sebesar 8,05% menjadi sebesar 50,38% pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali yakni sebesar 3,34% sehingga nilai rasio tersebut berubah menjadi sebesar 47,04%.

Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Seluma selama tahun anggaran 2010 – 2014 dilihat dari uraian di atas memperlihatkan nilai yang tidak stabil. Kecenderungan yang terjadi adalah lebih kepada penurunan. Dari analisa data terlihat bahwa penurunan rasio keserasian belanja tidak langsung tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 10,02%. Dan kenaikan rasio keserasian belanja tidak langsung tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,76%. Sementara itu, nilai Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung tertinggi pada Kabupaten Seluma terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 63,69% dan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 47,04%. Secara rata-rata nilai Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Seluma adalah sebesar 54,64%.

Berdasarkan Tabel 4.8, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di lihat dari Rasio Keserasian Belanja Langsung pada tahun 2010 adalah mencapai nilai rasio sebesar 36,30%. Nilai rasio keserasian tersebut pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 10,02% atau nilai rasionya menjadi 46,32%. Namun kemudian, pada tahun 2012 nilai rasio keserasian belanja langsung tersebut mengalami penurunan sebesar 4,76% sehingga nilai rasionya menjadi 41,56%. Akan tetapi pada tahun 2013, nilai rasio keserasian tersebut mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 8,05% dan pada tahun 2014, rasio keserasian tersebut

kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 3,34% sehingga nilai rasio berubah menjadi 52,95%.

Bila dilihat secara rinci, tergambar bahwa Rasio Keserasian Belanja Langsung Kabupaten Seluma selama tahun 2010 – 2014 terjadi peningkatan yang bervariasi dari waktu ke waktu. Dari hasil analisa data terlihat bahwa penurunan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 4,76%, Sementara kenaikan rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 10,02%.

Bila dikaji lebih jauh, Rasio Keserasian Belanja Langsung tertinggi pada Kabupaten Seluma terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 52,95% dan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 36,30%. Seara rata-rata nilai Rasio Keserasian Belanja Langsung pada Kabupaten Seluma mencapai nilai sebesar 45,35%.

### **C. Rasio Keserasian Belanja Kabupaten Bengkulu Tengah**

Berdasarkan Tabel 4.7, Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam kurun tahun 2010 - 2014 memperlihatkan fluktuasi nilai rasio yang bervariasi. Pada tahun 2010, nilai rasio keserasian ini mencapai nilai sebesar 57,33%. Namun pada tahun 2011, nilai rasion tersebut mengalami penurunan sebesar 6,68% atau nilai rasionnya turun menjadi 50,65%. Dan pada tahun 2012, nilai rasio keserasian tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,56% sehingga nilai rasio tersebut menjadi 53,21%. Akan tetapi pada tahun 2013, nilai rasio keserasian belanja tidak langsung tersebut mengalami penurunan kembali sebesar 3,53% atau nilai rasio tersebut naik menjadi sebesar 49,68%. Dan pada akhirnya pada tahun 2014, nilai rasio keserasian tersebut mengalami

kenaikan kembali sebesar 0,11% sehingga nilai rasio tersebut menjadi sebesar 49,79%.

Hasil analisa memperlihatkan bahwa Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Bengkulu Tengah selama tahun anggaran 2010 – 2014 memperlihatkan nilai yang bervariasi, yakni terjadi penurunan dan kenaikan yang berfluktuatif. Dari hasil analisa terlihat bahwa penurunan rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 6,68% dan kenaikan rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 2,56%. Sementara itu, nilai Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 57,33% dan nilai rasion keserasian terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 49,68%. Dan secara rata-rata nilai Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebesar 52,13%.

Berdasarkan Tabel 4,8, hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ditinjau dari Rasio Keserasian Belanja Langsung selama tahun 2010 – 2014 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yang berfluktuasi. Pada tahun 2010 nilai rasio kemandirian belanja langsung di kabupaten ini mencapai nilai sebesar 42,66%. Dan pada tahun 2011 nilai rasio tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,68% sehingga nilai rasio keserasian menjadi 49,34%. Namun pada tahun 2012, nilai rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 2,56% dan nilai rasio berubah menjadi 46,78%. Akan tetapi pada tahun 2013, Rasio keserasian tersebut mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 3,53%. Dan pada tahun 2014, rasio keserasian tersebut mengalami penurunan kembali sebesar 0,11% sehingga nilai rasio tersebut berubah menjadi sebesar 50,20%.



Rasio Keserasian Belanja Langsung Kabupaten Bengkulu Tengah selama tahun anggaran 2010 – 2014 dari uraian di atas, terlihat bahwa menunjukkan nilai yang tidak stabil. Dari hasil analisa terlihat bahwa penurunan rasio nilai keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 2,56% dan kenaikan nilai rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 6,68%. Namun bila dilihat dari sisi nilai Rasio Keserasian Belanja Langsung tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni naik sebesar 50,31% dan nilai rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2010 yakni dengan sebesar 42,66%. Secara rata-rata nilai Rasio Keserasian Belanja Langsung di Kabupaten Bengkulu Tengah selama 5 tahun masa observasi mencapai nilai sebesar 47,86%.

Berdasarkan analisa diatas dapat diketahui, bahwa bila ditinjau dari sisi Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung pada tiga Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu nilai rasio keserasian tertinggi terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah dan kemudian disusul oleh Kabupaten Seluma dan berikutnya Kabupaten Mukomuko memiliki rasio keserasian yang paling rendah. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah telah menggunakan belanja tidak langsung daerahnya untuk kepentingan yang tidak berkaitan secara langsung seperti belanja hibah dan bantuan sosial.

Dari analisa diatas, bila ditinjau dari sisi Keserasian Belanja Langsung pada tiga kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu dengan membandingkan Rasio keserasian dari tiga kabupaten pemekaran tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Mukomuko memiliki nilai rasio keserasian belanja langsung lebih tinggi dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya. Nilai rasio Keserasian Belanja Langsung pada Kabupaten Mukomuko tersebut secara rata-rata mencapai nilai

sebesar 56,09%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nilai rasio kesrasian belanja langsung sebesar 47,86%. Sementara nilai Rasio Belanja Langsung terendah didapat oleh Kabupaten Seluma yaitu dengan nilai rasio sebesar 45,35%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah telah menggunakan belanja langsung daerahnya untuk kepentingan yang berkaitan secara langsung seperti belanja barang dan jasa, serta belanja modal

Jika dibandingkan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada ketiga kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu tersebut, berdasarkan Tabel 4.7 dan 4.8 Kabupaten Mukomuko memperoleh hasil Rasio Belanja Tidak Langsung secara rata-rata sebesar 43,90% dan Rasio Belanja Langsung secara rata-rata mencapai nilai 56,09%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko lebih banyak menggunakan dana untuk Belanja Langsung dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah menggunakan anggarannya sesuai peruntukannya agar kualitas outputnya meningkat dan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

Sementara untuk Kabupaten Seluma dan Kabupaten Benteng, dilihat dari perbandingan perhitungan nilai Rasio Belanja Tidak Langsung secara rata-rata mencapai nilai sebesar 54,64% dan 52,13% dan nilai Rasio Belanja Langsung mencapai nilai rata-rata sebesar 45,35% dan 47,86%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Benteng lebih banyak menggunakan dana untuk Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan

Belanja Langsung. Hal ini memperlihatkan bahwa kedua kabupaten pemekaran tersebut belum masih belum optimal dalam penggunaan anggarannya. Dalam hal mana penggunaan anggaran seharusnya lebih diprioritaskan untuk belanja langsung agar kualitas output kegiatan dan stabilisasi pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

#### 4.1.2.6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yaitu berkenaan dengan rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat dalam Tabel 4.9 tentang Perbandingan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu sebagai berikut.

**Tabel 4.9**  
**Perbandingan Ketergantungan Keuangan Daerah**  
**Pada Tiga Kabupatendi Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014**

Nama Daerah	Tahun Anggaran					Rata-Rata	Kriteria
	2010	2011	2012	2013	2014		
Mukomuko	93,75%	95,48%	96,09%	95,25%	94,40%	95,00%	Tinggi
Seluma	96,74%	98,26%	98,38%	98,43%	97,46%	97,85%	Tinggi
Benteng	99,08%	99,03%	98,35%	98,51%	98,24%	98,64%	Tinggi

Sumber : laporan Realisasi APBD (Data diolah)

#### A. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan Tabel 4.9 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko selama tahun anggaran 2010-2014 dapat

dilihat bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah masih sangat tinggi. Hal ini terlihat bahwa selama masa 5 tahun tersebut nilai rasio ketergantungan keuangannya masih mengandalkan sumber keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi. Nilai rasio ketergantungan tersebut masih berada dalam kategori tinggi yakni yang ditandai dengan klasifikasi rasio tersebut berada pada interval 75% - 100%. Nilai rasio pada kategori ini mengindikasikan rasio ketergantungan daerah relatif masih tinggi terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Bila diamati secara lebih mendalam, rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tahun 2010 mencapai nilai sebesar 93,75%. Namun pada tahun 2011, rasio ketergantungan tersebut mengalami kenaikan yakni sebesar 1,73% dan menjadikan nilai rasio ketergantungan berubah menjadi 95,48%. Demikian pula pada tahun 2012, nilai rasio tersebut mengalami peningkatan kenaikan kembali yakni sebesar 0,61% atau nilainya naik menjadi sebesar 69,09%. Selanjutnya pada tahun 2013, nilai rasio ketergantungan tersebut mengalami penurunan yakni sebesar 0,84% sehingga nilai rasio turun menjadi 95,25%. Dan pada tahun 2014, nilai rasio tersebut mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 0,85% yang menjadi nilai rasio ketergantungan tersebut sebesar 94,40%.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko pada tahun anggaran 2010 – 2014 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dan memiliki kecenderungan turun dan naik dari waktu ke waktu. Dari hasil analisa data terlihat bahwa penurunan rasio ketergantungan tertinggi di Kabupaten Mukomuko terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 0,85% dan sebaliknya kenaikan rasio ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 1,73%. Disisi lain,

nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 96,09%. Sementara, nilai rasio ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2010 yakni dengan nilai rasio sebesar 93,75%.

Secara rata-rata nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko adalah sebesar 95,00%. Nilai rasio ini memperlihatkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Mukomuko terhadap pemerintah pusat maupun provinsi relatif masih tinggi. Hal ini disebabkan sumber pendapatan daerah masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat sementara sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli daerah masih sangat kecil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemampuan daerah Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan fungsinya sebagai daerah otonomi masih rendah.

## **B. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma**

Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Selumaselama periode 2010 – 2014 menunjukkan nilai yang relatif stabil. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan namun perubahan tersebut tidak memberikan nilai yang besar atas rasio ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Seluma.

Hasil analisa data tergambar bahwa nilai rasio ketergantungan keuangan di Kabupaten Seluma pada tahun 2010 menunjukkan nilairasio sebesar 96,74%. Pada tahun 2011 nilai rasio tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,52% sehingga nilai rasio tersebut menjadi sebesar 98,26%. Kemudian pada tahun 2012, nilai rasio ketergantungan tersebut mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 0,12%. Demikian pula, kenaikan nilai rasio yang sama juga terjadi kembali pada tahun

2013 yakni dengan nilai kenaikan sebesar 0,05% atau nilai rasionya menjadi 98,43%. Namun pada tahun 2014, nilai rasio tersebut mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 0,97% sehingga nilai rasionya menjadi sebesar 97,46%.

Bila dikaji lebih jauh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma selama tahun anggaran 2010 – 2014 memperlihatkan nilai rasio yang tidak berubah. Jika ada perubahan maka perubahan yang terjadi tidaklah memperlihatkan dampak yang besar atas perubahan ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Seluma. Dari hasil analisa terlihat bahwa penurunan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 0,97%. Sementara kenaikan tertinggi nilai rasio ketergantungan keuangan di Kabupaten Seluma terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 1,52%.

Rasio ketergantungan keuangan di kabupaten Seluma yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni dengan nilai rasio sebesar 98,43%. Sementara nilai rasio ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2010 yakni dengan nilai sebesar 96,74%. Secara rata-rata nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma adalah sebesar 97,85%. Nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma tersebut berada dalam kriteria “tinggi” yakni berada pada kategori persentase 75% - 100%. Nilai rasio ketergantungan dengan kategori tersebut menggambarkan bahwa pola ketergantungan keuangan di Kabupaten Seluma relatif tinggi. Selama 5 tahun masa observasi terlihat bahwa angka ketergantungan atas dana transfer dari pemerintah pusat relatif stabil dan cenderung tinggi. Bila dilihat pada Lampiran 12 tergambar bahwa pendapatan Kabupaten Seluma yang bersumber dari dana transfer selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni sebesar Rp 370.700.000.000,- pada tahun 2010 dan meningkat

menjadi Rp 600.578.000.000 pada tahun 2014. Angka ini menunjukkan nilai peningkatan yang hampir dua kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun.

### **C. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah**

Berdasarkan Tabel 4.9 dan hasil olah data tergambar bahwa rasio ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah selama periode 2010 – 2014 relatif stabil yakni secara rata-rata berada pada nilai 98,64%. Hasil ini memperlihatkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan kabupaten ini dalam kriteria “tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Tengah masih sangat mengandalkan keuangan yang berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat.

Bila dilihat lebih jauh, tergambar bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2010 mencapai nilai sebesar 99,08%. Kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,05% sehingga besaran nilai rasio tersebut menjadi 99,03% dan pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali sebesar 0,68%. Selanjutnya pada tahun 2013 nilai rasio ketergantungan tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Kemudian pada tahun 2014 nilai rasio tersebut mengalami penurunan kembali yakni sebesar 0,27%. Dari uraian ini terlihat bahwa fluktuasi atas peningkatan dan atau penurunan nilai rasio atas ketergantungan keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah tidak memiliki perubahan yang besar. Nilai perubahan rasio yang sangat kecil tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Bengkulu Tengah masih sangat mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Bila dilihat lebih rinci, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 99,08% dan yang

terendah terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 98,24%. Sementara secara rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada kabupaten ini adalah sebesar 98,64%. Hal ini memperlihatkan bahwa rasio perubahan angka ketergantungan kabupaten Bengkulu Tengah dari waktu ke waktu tidaklah besar. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa kemampuan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menghimpun dana yang bersumber dari daerah sendiri masih sangat lemah.

Analisa diatas dapat diketahui bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada ketiga Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu tersebut seluruhnya berada pada katagori “Tinggi”, yaitu berada pada rentang 75 – 100%. Namun bila rasio ketergantungan keuangan tersebut dibandingkan diantara ketiga kabupaten pemekaran tersebut, maka Kabupaten Mukomuko merupakan daerah yang nilai rasio ketergantungan keuangannya yang paling rendah yakni sebesar 95%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Seluma dengan nilai rasio sebesar 97,85% dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tertinggi diperoleh Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sebesar 98,64%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan daerah pemekaran yang masih mengandalkan pendapatn daerahnya secara dominan dari dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, ketiga daerah pemekaran tersebut belum mampu mengelola sumberdaya yang ada di daerahnya masing-masing sebagai sumber PAD-nya.

#### **4.1.3. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu**

##### **4.1.3.1. *Share dan Growth***



Diawali dengan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan perhitungan dan analisis Kinerja PAD melalui ukuran *share dangrowth* kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode kuadran. adapun hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.10 tentang Perbandingan *Share* pada Tiga Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu sebagai berikut.

**Tabel 4.10**  
**Perbandingan Share Keuangan Daerah Pada Tiga**  
**Kabupaten di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014**

Nama Daerah	Tahun Anggaran					Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	
Mukomuko	7,17%	4,76%	2,90%	3,49%	5,46%	4,76%
Seluma	3,05%	1,69%	1,59%	1,35%	2,35%	2,01%
Benteng	0,89%	0,88%	1,57%	1,46%	1,73%	1,31%

Sumber : laporan Realisasi APBD (Data diolah)

Adapun hasil perhitungan *Growth* dapat dilihat Tabel 4.11 tentang Perbandingan *Growth* pada tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu seperti pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 4.11**  
**Perbandingan Growth Pada Tiga**  
**Kabupaten di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2014**

Nama Daerah	Tahun Anggaran					Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	
Mukomuko	214,91%	77,55%	87,50%	139,59%	146,23%	133,16%
Seluma	126,46%	68,13%	89,76%	111,93%	183,05%	115,86%
Benteng	100,00%	147,87%	173,30%	106,58%	128,57%	131,26%

Sumber : laporan Realisasi APBD (Data diolah)

#### **A. *Share* dan *Growth* Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko**

Analisa dengan pendekatan *Share* merupakan suatu pendekatan untuk menilai kekuatan keuangan yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dibandingkan dengan Total Belanja Daerah. Berdasarkan Tabel 4.10, hasil analisa tentang perbandingan kemampuan keuangan daerah pada tiga kabupaten pemekaran tersebut atas pendapatan totalnya memperlihatkan nilai yang sangat bervariasi.

Dari Tabel 4.10 terlihat bahwa pertumbuhan *Share* pada Kabupaten Mukomuko selama tahun 2010 -2014 memperlihatkan fluktuasi pertumbuhan yang bervariasi. Pada tahun 2010, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko di lihat melalui nilai *Share* adalah sebesar 7,17%. Kemudian pada tahun 2011, nilai *Share* tersebut mengalami penurunan sebesar 2,41% yakni menjadi sebesar 4,47% dan pada tahun 2012 nilai tersebut kemudian mengalami penurunan kembali sebesar 1,86% sehingga nilai *Share* tersebut berubah menjadi 2,90%. Akan tetapi pada tahun 2013, nilai *Share* keuangan pada kabupaten ini mengalami kenaikan kembali sebesar 0,59%. Demikian pula pada tahun 2014, nilai *Share* tersebut juga kembali mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 1,97% dan menjadikan nilai *Share* pada kabupaten ini sebesar 5,34%.

Bila dilihat lebih jauh, Selama tahun 2010 -2014, penurunan nilai *Share* keuangan di Kabupaten Mukomuko tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 2,41% dan kenaikan nilai *Share* keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 1,97%. Sementara nilai *Share* keuangan tertingginya terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 7,17% dan nilai *Share* terendah terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 2,90%. Namun secara rata-rata, selama 5 tahun pengamatan nilai *Share* keuangan di Kabupaten Mukomuko adalah mencapai nilai sebesar 4,76%.

Selanjutnya guna melihat tingkat pertumbuhan keuangan daerah (*Growth*) maka hal akan menggambarkan perkembangan kemampuan daerah setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan keuangan daerah ini dinilai melalui perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan dengan PAD tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko di lihat melalui nilai *Growth* keuangan yang bersumber dari pendapatan daerahnya, pada tahun 2010 mencapai nilai sebesar 214,91%. Dan pada tahun 2011 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 137,36% sehingga menjadi sebesar 77,55%. Akan tetapi pada pada tahun 2012 nilai tersebut mengalami sebesar 9,95% dan pada tahun 2013 nilai tersebut kembali mengalami kenaikan sebesar 52,09% sehingga nilai pertumbuhan keuanga Kabupaten Mukomuko menjadi 139,59%. Demikian pula pada tahun 2014, nilai *Growth* keuangan kabupaten ini kembali mengalami kenaikan sebesar 6,64% sehingga nilainya naik menjadi sebesar 146,23%.

Dapat diketahui bahwa *Growth* kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mukomuko antara tahun anggaran 2010 – 2014 selalu terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 137,36%. Kenaikan pertumbuhan keuangan daerah ini yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 52,09%. Sementara bila dilihat dari nilai *Growth* tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai nilaisebesar 214,91% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 dengan nilai sebesar 77,55%. Secara rata-rata selama tahun 2010 -2014, nilai pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Mukomuko adalah sebesar 133,16%.

## **B. *Share* dan *Growth* Keuangan Daerah Kabupaten Seluma**

Berdasarkan Tabel 4.10, nilai *share* keuangan daerah Kabupaten Seluma pada tahun 2010 mencapai nilai sebesar 3,05% namun pada tahun 2011 nilai *share* tersebut mengalami penurunan sebesar 1,36% sehingga nilainya menjadi 1,69%. Kemudian pada tahun 2012 nilai *share* keuangan daerah tersebut kembali mengalami penurunan yakni sebesar 0,10% menjadi sebesar 1,59%. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali sebesar 0,24% menjadi sebesar 1,35%. Kenaikan nilai *share* pada Kabupaten Seluma baru terjadi kembali pada tahun 2014 yakni naik sebesar 1% dan menjadikn nilai *share*-nya berada pada nilai sebesar 2,35%.

Berdasarkan Tabel 4.10 bila dilihat secara menyeluruh nilai *share* keuangan di Kabupaten Seluma selama periode 2010 – 2014 memperlihatkan nilai yang terun turun. Peningkatan nilai *share* hanya terjadi pada tahun 2014 dengan peningkatan yang relative kecil, yakni 1%. Secara rata-rata dari 5 tahun masa pengamatan terlihat bahwa nilai *share* keuangan di Kabupaten Seluma hanya mencapai nilai 2,01%. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan keuangan yang bersumber dari PAD di Kabupaten Seluma masih rendah.

Selanjutnya bila dilihat dari nilai pertumbuhan keuangan daerah yang bersumber dari PAD-nya, Tabel 4.11 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhannya selama tahun 2010-2014 sangat berfluktuasi. Pada tahun 2010 nilai pertumbuhannya adalah sebesar 126,46%. Pada tahun 2011 nilai pertumbuhan tersebut mengalami penurunan yang relative cukup tingi yakni sebesar 58,33%. Namun pada tahun 2012 nilai pertumbuhan keuangan tersebut mengalami kenaikan sebesar 21,63% sehingga nilai *growth*-nya menjadi 89,76%. Dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan kembali dengan besaran pertumbuhan yang relatif sama yakni

sebesar 22,17%. Demikian pula pada tahun 2014 pertumbuhan PAD di Kabupaten Seluma kembali mengalami kenaikan yang cukup besar yakni sebesar 71,12%. Sehingga pada tahun 2013 nilai pertumbuhan keuangan yang bersumber dari PAD di Kabupaten Seluma menjadi sebesar 183,05%. Secara rata-rata selama tahun 2010-2014, tingkat pertumbuhan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah pada Kabupaten Seluma adalah mencapai 115,86. Tingkat pertumbuhan yang ini tergolong rendah.

### **C. *Share* dan *Growth* Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah**

Berdasarkan Tabel 4.10, tergambar bahwa selama periode 2010 – 2014 kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mendukung pembangunan masih rendah. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai *share* atas keuangan daerah yang bersumber dari PAD untuk mendukung pendapatan total Kabupaten Bengkulu Tengah. Nilai *share* tersebut adalah sebesar 1,31%. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menghimpun dana melalui PAD masih rendah.

Secara menyeluruh perkembangan nilai *share* di Kabupaten Bengkulu Tengah terlihat bahwa pada tahun 2010 nilai *share* tersebut mencapai 0,89%. Namun pada tahun 2011, nilai *share* keuangan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,01% sehingga nilainya menjadi sebesar 0,88%. Dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 0,69%. Akan tetapi pada tahun 2013 nilai *share* keuangan tersebut mengalami penurunan kembali yakni sebesar 0,11% dan pada tahun 2014 kenaikan nilai *share* keuangan tersebut kembali dapat dicapai dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,27% dan menjadikan nilai *share*-nya sebesar 1,73%.

Selanjutnya bila dikaji dari sisi nilai *Growth* atau pertumbuhan kemampuan keuangan yang bersumber dari PAD, pertumbuhan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah relatif Tinggi. Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa selama tahun 2010 – 2014 kemampuan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mendorong peningkatan PAD-nya tinggi. Secara rata-rata nilai pertumbuhan tersebut adalah 131,26% dan masuk dalam katagori tinggi.

Bila dikaji lebih jauh, selama 5 tahun tersebut upaya peningkatan PAD di Kabupaten Bengkulu Tengah telah diupayakan namun hasilnya belum maksimal. Bahkan terlihat upaya yang dilakukan masih belum terencana dengan baik. Hal ini ditandai dengan fluktuasi nilai pertumbuhan dari waktu ke waktu. Hal ini tergambar bahwa pada tahun 2010 nilai pertumbuhan PAD-nya mencapai nilai sebesar 100,00%. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan PAD tersebut mengalami kenaikan masing-masing sebesar 47,87% dan 25,43%. Namun pada tahun 2013 pertumbuhan PAD di Kabupaten Bengkulu Tengah kembalimengalami penurunan sebesar 66,72%. Penurunan ini relatif cukup besar yakni dengan nilai pertumbuhan menjadi 106,58%. Dan pada tahun 2014 pertumbuhan PAD tersebut mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 21,99%. Namun nilai pertumbuhan tersebut masih berada dibawah nilai pertumbuhan pada tahun 2011 dan 2012.

Kondisi pertumbuhan kemampuan penggalian PAD ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum mampu menggali dana yang bersumber dari potensi daerahnya secara maksimal. Hal ini juga memperlihatkan perencanaan daerah dalam penggalian PAD belum dikelola secara maksimal.

Berdasarkan Tabel 4.10 dan hasil analisa atas nilai *share* keuangan daerah

atas total pendapatannya terlihat bahwa nilai *share* pada ketigakabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu menunjukkan seluruhnya masih berada dalam katagori rendah. Namun bila dibandingkan diantara ketiga kabupaten pemekaran tersebut terlihat bahwa Kabupaten Mukomuko memiliki nilai *share* yang lebih tinggi persentasenya yaitu sebesar 4,76%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Seluma yakni dengan nilai *share* sebesar 2,01%. nilai *share* terendah diperoleh Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu dengan nilai sebesar 1,31%.

Berdasarkan tingkat pertumbuhan PAD (*Growth*), rangkuman hasil analisa yang ditunjukkan pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PAD pada tiga kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu secara rata-rata selama tahun 2010 – 2014 berada pada katagori rendah. Namun bila dibandingkan diantara ketiga kabupaten pemekaran tersebut maka pertumbuhan PAD di Kabupaten Mukomuko memperlihatkan nilai yang lebih tinggi yaitu sebesar 133,16%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Tengah yakni dengan tingkat pertumbuhan sebesar 131,26%. Sementara nilai pertumbuhan PAD terendah diperoleh Kabupaten Seluma yaitu sebesar 115,86%.

Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga kabupaten pemekaran yang berada di Provinsi Bengkulu tersebut belum mampu mengelola potensi daerah secara baik. Dengan kata lain, pengelolaan sumber PAD belum dilakukan secara maksimal. Fluktuasi nilai pertumbuhan selama 5 tahun tersebut memperlihatkan kemampuan ketiga daerah pemekaran tersebut dalam menggali PAD belum maksimal.

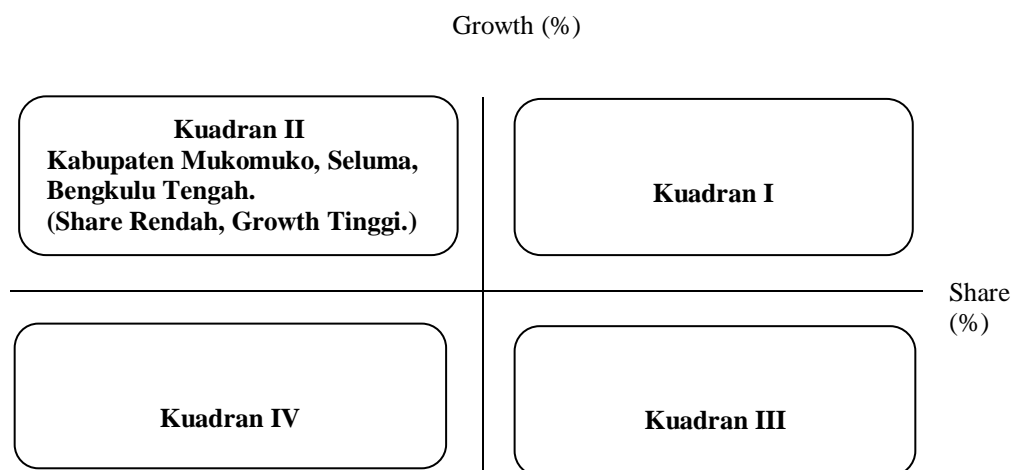
#### **4.1.3.2. Peta Kemampuan Keuangan Daerah**

pertumbuhan Peta kemampuan keuangan daerah adalah salah satu

pendekatan untuk menentukan posisi daerah dilihat dari tingkat nilai *share* keuangan dan nilai (*growth*) keuangan daerah. Pemetaan ini akan merumuskan kekuatan daerah dalam mendanai pembangunan daerah melalui kekuatan dana yang dihimpun dari daerah itu sendiri.

Berikut ini gambar peta kemampuan keuangan berdasarkan metode kadaran rata rata *Share* dan *Growth*, dan Tabel Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran.

Gambar 4.1.  
Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan  
Metode Kuadran Rata-rata *Share* (%) dan *Growth* (%)



**Tabel 4.12. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran**

KUADRAN	KONDISI
<b>I</b>	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah mempunyaikemampuan mengembangkan potensi lokal.Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilaishare dan <i>growth</i> yang tinggi.
<b>II</b>	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyaipengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam TotalBelanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanjamasih rendah namun



	pertumbuhan ( <i>growth</i> ) PADtinggi.
<b>III</b>	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil.Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi,namun pertumbuhan PAD rendah.
<b>IV</b>	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja,dan daerah belum mempunyai kemampuanmengembangkan potensi lokal. Sumbangan PADterhadap Total Belanja dan pertumbuhan PADterhadap Total Belanja dan pertumbuhan PADrendah.

Sember : Bapenas 2003

Berdasarkan hasil Tabel 4.10 menunjukkan nilai *Share* rata-rata di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah masing-masing adalah sebesar 4,76%, 2,01%, dan 1,31%. Sementara Tabel 4.11 menggambarkan nilai rata-rata *growth* dari Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Baengkulu Tengah dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar 133,16%., 155,86%., dan 131,26%.

Berdasarkan hasil perhitungan atas nilai *Share* dan *Growth* atas keuangan daerah pada tiga kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu tersebut terlihat bahwa nilainya berada pada kemampuan yang “Rendah”. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Bengkulu Tengah berada pada kondisi yang lemah.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai *Share* atas kemampuan keuangan daerah untuk berkontribusi dalam belanja daerah dan juga dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari ketiga daerah pemekaran di Provinsi tersebut apabila dipetakan maka masuk pada “Kuadran II”. Hal ini selaras dengan kriteria yang

dikeluarkan oleh Bappenas (2003), apabila dihubungkan dengan Tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran yang dikeluarkan oleh Bappenas 2003 dapat dimaknai bahwa kondisi ini belum ideal, tetapi ketiga kabupaten telah mengambil peran untuk mengembangkan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang untuk mengambil peran yang lebih besar dalam total belanja di daerah. Hal ini ditandai dengan sumbangan PAD terhadap total belanja PAD yang rendah namun pertumbuhan PAD-nya relatif tinggi.

Hal ini menggambarkan bahwa peran PAD pada ketiga kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu, yakni Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Tengah masih memiliki kemampuan yang relatif rendah dalam menggali potensi daerah untuk memberikan kontribusi atas total dana belanja daerah masing-masing.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Rasio Kemandirian**

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumberdaya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman.

Berdasarkan Tabel 4.3 dari analisis diatas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian pada 3 (tiga) Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu tergolong rendah sekali karena berada pada persentase antara 0% - 25% dan pola hubungan termasuk pada pola hubungan Instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dengan kata lain pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah, jika dibandingkan Rasio Kemandirian pada 3 (tiga) Kabupaten pemekaran tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Mukomuko lebih tinggi Rasio Kemandiriannya kemudian diikuti oleh Kabupaten Seluma Rasio Kemandirian terendah didapat oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak mampu menjalankan pemerintahannya sendiri dikarenakan pemerintah daerah masih tergantung dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi terlihat dari besarnya dana perimbangan yang diterima masing – masing daerah dari pemrintah pusat/provinsi, sementara penerimaan dari PAD masing – masing daerah sangat kecil. Dengan kata lain pemerintah daerah pada ketiga kabupaten pemekaran belum bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, seperti yang diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan pemerintah daerah 3(tiga) kabupaten

pemekaran sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah.

Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula peluang untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pada masyarakat dalam berbagai bentuknya, hal ini sependapat dengan Halim (2012) yang menyatakan semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal/pemerintah pusat atau provinsi semakin rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muchtar, Kawalung dan Rompas (2014) *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 14 No 2-mei 2014. Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado. jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong rendah sekali atau Instruktif. Hal tersebut juga terjadi pada tiga kabupaten pemekaran pada penelitian ini dimana rata-rata rasionya sebesar 5,75% dan Kinerja Keuangannya tergolong Instruktif. Menurut Oktavianus penyebab terjadinya kinerja keuangan yang rendah sekali tersebut hampir sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi yang mereka miliki sendiri guna menaikkan PAD.

Penyebabnya adalah belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada tiga kabupaten pemekaran pada umumnya dikarenakan kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan

dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidak optimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Di sisi lain, sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (*mark up*) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada ketiga Kabupaten melambat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, pelayanan terhadap publik kurang memuaskan dan tidak maksimal, kesejahteraan masyarakat belum tercapai, ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat/provinsi sangat besar dengan kata lain pemerintah daerah hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat/provinsi dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dalam menghadapi permasalahan diatas diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko untuk mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan cara melakukan upaya pengusahaan atau penggalian (eksploitasi) sumber daya alam yang baru, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap komponen penerimaan daerah pada pos laba usaha daerah, melakukan pembenahan pada sistem manajemen perusahaan daerah yang ada melalui implementasi *Balance Score Card based planning*, mengkaji ulang terhadap nilai jual atau jumlah objek pajak yang ada dalam pos bagi hasil pajak (pemerintah pusat dan propinsi) seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sudah dilimpahkan

ke daerah dengan mengkaji ulang jumlah objek, dan subjek pajak, demikian pula halnya dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan pajak, menambah jumlah pajak daerah secara proporsional dan profesional dengan melihat potensi pajak, dan retribusi daerah senyatanya. Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi perlu diupayakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru meliputi, menciptakan sektor produksi baru melalui upaya creative financing dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik (perijinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak) untuk menanamkan investasinya ke daerah, identifikasi sektor unggulan terhadap potensi daerah perlu terus digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber PAD potensial, misal sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, dan perdagangan, menarik investor melalui insentif pajak ringan, birokrasi yang mudah, infrastruktur yang mendukung, dengan tujuan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat.

#### **4.2.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah(PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

khususnya komponen PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah, menggunakan skala interval.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada 3 (tiga) Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu tergolong Sangat Kurang karena berada pada persentase antara 00,00% - 10,00% jika dibandingkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tiga Kabupaten pemekaran tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Mukomuko lebih tinggi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal-nya kemudian diikuti oleh Kabupaten Seluma dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terendah didapat oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah masih tergantung dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi terlihat dari besarnya total pendapatan yang diterima masing – masing daerah dari pemerintah pusat/provinsi, sementara penerimaan dari PAD masing – masing daerah sangat kecil dan sering terjadi penurunan dan kenaikan yang membuat rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menjadi sangat kurang.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada 3 (tiga) pemekaran Provinsi Bengkulu ini mengacu pada pendapat Mahmudi (2010) yang menyatakan semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, dengan kata lain tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan tidak terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian ini juga sependapat dengan Dwirandra (2008), dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi

daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengurangi ketergantungan pemerintah kabupaten kepada pusat yang pada prinsipnya semakin besar PAD dalam APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Tyas (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sleman Tahun 2006-2010*. *Jurnal Kajian Pendidikan dan akuntansi Indonesia Edisi I Volume I /Tahun 2012*. dikategorikan Kurang karena berada di bawah 14,41%.

Menurut Zulkarnain permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah ketidakmampuan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk menggalipotensi-potensi daerah yang ada, guna meningkatkan PAD dan ketergantungan yang masih sangat besar terhadap bantuan atau pun pinjaman dari pemerintah pusat. Begitupun juga yang terjadi pada ketiga kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu dimana peneliti menyimpulkan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah pada tiga kabupaten pemekaran dilihat dari Derajat Desentralisasi Fiskal masih tergolong sangat kurang.

Berdasarkan uraian diatas, hal ini terjadi karenakan kurangnya peranan pemerintah daerah dalam menggali peningkatan Pendapatan Asli Daerah, potensi sumber daya manusia yang kurang, rendahnya Pendapatan Asli Daerah tidak bisa mengimbangi total pendapatan daerah, kurangnya kinerja pemerintah daerah pada 3 (tiga) Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu terlihat dari kriteria rasio derajat desentralisasi fiskal, sarana dan prasarana yang belum memadai.



Akibatnya roda pemerintahan Kabupaten Mukomuko tidak berjalan dengan baik, terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana, tingkat perekonomian masyarakat yang kurang baik, pelayanan umum pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi tidak maksimal, pembangun infrastruktur menjadi lambat tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Solusi dari permasalahan diatas adalah: diharapkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko bisa meningkat pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan restribusi daerah, penempatan sumber daya manusia dengan baik sesuai dengan keahlian yang dimiliki, mengendalikan KKN dalam pemungutan pajak dan distribusi, transparansi laporan keuangan kepada masyarakat.

#### **4.2.3. Rasio Efektivitas**

Tingkat efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan pemerintah kabupaten dan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Daerah.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil perbandingan Rasio Efektifitas pada 3 (tiga) Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut untuk Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah rata-rata hasil perhitungan 2010-2014 dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah masuk dalam kriteria Cukup Efektif, berbeda dengan Kabupaten Seluma Rasio Efektivitas keuanganya di kategorikan Sangat Efektif karena berada pada persentase lebih dari 100%.

Keberhasilan rasio efektivitas pada tiga kabupaten pemekaran Provinsi Bengkulu inimgaju kepada pendapat Halim (2012) yang mengatakan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, dengan kata lain pemerintah daerah pada tiga kabupaten pemekaran Provinsi Bengkulu dalam merealisasikan pendapatan asli daerah telah sesuai dengan target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan.

Pencapaian realisasi pendapatan asli daerah bisa terjadi karena pemerintah daerah dalam menetapkan target pendapatan asli daerah terlalu rendah padahal masih banyak potensi pendapatan asli daerah yang bisa di tingkatkan hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang mengemukakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah dan masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dasilva (2001) yang meneliti tentang evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 1993 – 1998, dengan menggunakan Kabupaten Ende dan Kabupaten Manggarai sebagai pembandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan APBD Kabupaten Manggarai adalah sebesar 102,98% dengan predikat sangat efektif, sementara Kabupaten Ende adalah 94,70% dengan kategori efektif. Sedangkan Kabupaten Sikka dengan rasio efektivitas 91,33% dan dikategorikan efektif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Puspitasari (2012) yang melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kota Malang dijelaskan bahwa kinerja keuangan

Kota Malang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah Efektif. Begitupun juga dalam penelitian ini dimana kinerja keuangan Kabupaten Mukomuko Cukup efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Hasil penelitian ini sesuai juga sesuai dengan penelitian Muchtar, Kawalung dan Rompas (2014) *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 No 2-Mei 2014. Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan APBD adalah dengan predikat Sangat Efektif, sementara Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kategori Cukup Efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Sementara rasio efektivitas yang terjadi pada Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan hasil yang Cukup Efektif ini disebabkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah yang terlalu kecil dan target penerimaan yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan kondisi potensi riil daerah, potensi pendapatan asli daerah yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, dalam merencanakan target pendapatan asli daerah tidak menggunakan tenaga profesional dibidangnya, dalam memperhitungkan target pendapatan asli daerah tidak memperhatikan kondisi dan potensi yang ada.

Akibatnya antara target dan realisasi pendapatan asli daerah yang diharapkan tidak sesuai, target pendapatan asli daerah yang diharapkan besar tapi kenyataan pada realisasinya lebih kecil hal ini dikarenakan survei yang dilakukan

tidak sesuai pada kenyataannya atau survei dilakukan oleh orang yang tidak sesuai profesinya, rencana strategis pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana kerja. Program pemerintah yang akan dilaksanakan tidak tercapai sesuai target. Solusinya pemerintah daerah diharapkan sebelum merencanakan target pendapatan asli daerah harus melakukan survei terhadap pendapatan asli daerah dan dilakukan oleh orang yang profesional dibidangnya, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan potensi apa saja yang potensial yang menghasilkan pendapatan asli daerah yang besar yang ada di daerahnya.

#### **4.2.4. Rasio Efisiensi**

Tingkat efisiensi dimaksudkan untuk menilai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Rasio Efisiensi pada 3 (tiga) Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu tergolong dalam kriteria Tidak Efisien karena berada pada persentase diatas 100% . Jika dibandingkan rasio efisiensi dari tiga kabupaten pemekaran tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Mukomuko lebih tinggi persentasenya rasio efisiensi kemudian diikuti oleh Kabupaten Seluma dan rasio efisiensi terendah didapat oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah lebih banyak menggunakan belanja daerahnya dari pada pendapatan daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah pada tiga kabupaten pemekaran perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja daerah dan berapa besar realisasi penerimaan sehingga dapat diketahui seberapa efisien belanja daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Hal ini sependapat dengan pendapatnya Halim (2007) yang menyatakan bahwa semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Ini terjadi dikarenakan realisasi belanja daerah lebih besar dari pada realisasi pendapatan dan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki kecenderungan selalu ingin menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD. hal ini juga disebabkan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko lebih banyak menggunakan kebutuhan belanja dari pada pendapatan daerahnya, dalam mentargetkan pendapatan daerah pemerintah daerah kurang memperhatikan potensi pendapatan daerahnya, pemborosan anggaran belanja daerah di sebabkan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko melakukan belanja daerah tidak sesuai dengan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat seolah-olah hanya menghabiskan anggaran.

Akibatnya pemborosan anggaran pada pemerintah daerah, masyarakat tidak merasakan manfaat dari pemborosan anggaran daerah, tidak terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan ekonomis. Solusinya dalam merencanakan belanja daerah Pemerintah Daerah harus memperhatikan kebutuhan daerahnya dan dalam hal mentargetkan pendapatan

Pemerintah daerah sebaiknya mempertimbangkan kondisi riil daerah tersebut, melakukan pengawasan dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Hony (2013) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Blora (Studi Kasus DPPKAD Kab. Blora Tahun 2007-2011)*. Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan hasil Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 99,61% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 2011 rasionya masing-masing sebesar: 88,22%; 108,07%; 111,41%; 98,49%; dan 91,87%.

#### **4.2.5. Rasio Keserasian Belanja**

Analisis Rasio Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan Analisis Keserasian Belanja, antara lain: Rasio Keserasian Belanja dapat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung = Total Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan Total Belanja Daerah.

Belanja Langsung = Total Belanja Langsung dibandingkan dengan Total Belanja Daerah.

Berdasarkan Tabel 4.7 dan 4.8 dapat diketahui bahwa Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung 3 (tiga) Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu Jika

dibandingkan Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung dari tiga Kabupaten pemekaran tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Mukomuko lebih kecil persentasenya Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung kemudian diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Tengah dan Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung tinggi didapat oleh Kabupaten Seluma. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah telah menggunakan belanja tidak langsung daerahnya untuk kepentingan yang tidak berkaitan secara langsung seperti belanja hibah dan bantuan sosial.

Dapat diketahui bahwa Keserasian Belanja Langsung tiga Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu Jika dibandingkan Rasio Keserasian Belanja Langsung dari 3 (tiga) Kabupaten pemekaran tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Mukomuko lebih tinggi persentasenya Rasio Keserasian Belanja Langsung kemudian diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Tengah dan Rasio Belanja Langsung terendah didapat oleh Kabupaten Seluma. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah telah menggunakan belanja langsung daerahnya untuk kepentingan yang berkaitan secara langsung seperti belanja barang dan jasa, belanja modal

Jika dibandingkan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tiga Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu berdasarkan Tabel 4.7 dan 4.8 Kabupaten Mukomuko menunjukkan hasil dari Perbandingan perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko lebih banyak menggunakan dana untuk Belanja Langsung dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung berarti Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah sesuai dengan peruntukannya agar kualitas outputnya

meningkat, fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

Keserasian belanja pada Kabupaten Mukomuko sependapat dengan pendapat Mahmudi (2010) yang menyatakan bahwa Rasio Keserasian Belanja bertujuan untuk keseimbangan antar belanja maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi antar belanja Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung karena sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan dan stabilisasi pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Nabila (2014) *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang 2008-2012. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.*

Sementara untuk Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah, Dilihat dari Perbandingan perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung. Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah lebih banyak menggunakan dana untuk Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan Belanja Langsung semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung karena sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan dan stabilisasi pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

#### **4.2.6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**



Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yaitu mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah secara rata-rata pada periode 2010 sampai dengan 2014 dari analisa diatas dapat diketahui bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 3 (tiga) Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu tergolong dalam kriteria Tinggi Ketergantungan Keuangan Daerahnya karena berada pada persentase 75% - 100% Jika dibandingkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dari 3 (tiga) Kabupaten pemekaran tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Mukomuko lebih Rendah persentasenya Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah kemudian diikuti oleh Kabupaten Seluma dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tertinggi didapat oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah lebih banyak mendapatkan bantuan transfer daripada pendapatan asli daerahnya. atau dengan kata lain menunjukkan tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Benteng masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

Bila dihubungkan dengan Tabel 4.9 yang mengacu pada pendapat Halim (2004) dalam Dwiranda (2007) dengan kriteria ketergantungan keuangan daerah pada 3 (tiga) Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu menunjukkan hasil

ketergantungan keuangan yang tinggi. Ini menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah Provinsi. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Tyas (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sleman Tahun 2006-2010. Jurnal Kajian Pendidikan dan akuntansi Indonesia Edisi I Volume I /Tahun 2012*. Dengan hasil 78,90% dikategorikan Tinggi karena berada di antara 75%-100%.

Tingginya Rasio Ketergantungan Keuangan 3 (tiga) Kabupaten pemekaran Provinsi Bengkulu ini disebabkan pendapatan asli daerah yang kurang, sumber daya manusia yang tidak memadai, ketidaksiapan pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengahdalam merencanakan pemekaran kabupaten. Akibatnya pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengahmasih sangat tergantung dengan pemerintah pusat/provinsi dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga pembangunan daerah tidak terlaksana sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, tidak bisa membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.Solusinya Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah harus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menitikberatkan pada pajak dan retribusi daerah, meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya pengaturan

rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat/provinsi.

#### 4.2.7. Share dan Growth

Diawali dengan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan perhitungan dan analisis Kinerja PAD melalui ukuran *share dan growth* kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode kuadran.

Dari hasil Tabel 4.10 dan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa *Share* pada 3 (tiga) Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu jika dibandingkan *Share* dari tiga Kabupaten pemekaran tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Mukomuko lebih tinggi persentasenya *Share* kemudian diikuti oleh Kabupaten Seluma dan *Share* terendah didapat oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah kontribusi pendapatan asli daerah yang relatif kecil.

Dari analisa diatas dapat diketahui bahwa *Growth* tiga Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu jika dibandingkan *Growth* dari 3 (tiga) Kabupaten pemekaran tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Mukomuko lebih tinggi persentase *Growth*-nya kemudian diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Tengah dan *Growth* terendah didapat oleh Kabupaten Seluma. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah secara rata-rata dari tiga Kabupaten tersebut diatas, bila dilihat dari Tabel 4.10 dan 4.11, yang mengacu pada pendapat Bapenas (2003) menunjukkan *Share* lebih Rendah dari pada *growth* dengan kata lain kondisi Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten

Bengkulu Tengah menunjukkan kondisi yang belum ideal seharusnya Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan *share* tinggi dan *growth* tinggi ini menunjukkan kondisi paling ideal.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Nabila (2014) *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang 2008-2012. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*. *Share* lebih Rendah dari pada *growth* dengan kata lain kondisi Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang menunjukkan kondisi yang belum ideal.

#### **4.2.8. Peta Kemampuan Keuangan Daerah**

Dari hasil Tabel 4.10 dan Tabel 4.11 perbandingan perhitungan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah didapat *Share* dan *growth* Rata-rata dari 3 (tiga) Kabupaten tersebut diatas yang mengacu pada pendapat Bapenas (2003) menunjukkan *Share* lebih rendah dari pada *growth* dengan kata lain kondisi Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan kondisi yang belum ideal.

Kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran posisi Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah berada pada kuadran II. Jika dihubungkan dengan Tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran maka dapat dimaknai bahwa Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Bengkulu Tengah

kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Nabila (2014) *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang 2008-2012. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*. berada pada kuadran II hal ini berarti bahwa kondisi ini belum ideal. Peran PAD yang besar dalam total belanja. sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD Tinggi.

#### **4.3. Implikasi Strategis**

Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode analisis dengan menganalisis indikator Rasio Kemandirian, Rasio Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, serta analisis Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan metode *Share* dan *Growth* dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan metode kuadran.

Berdasarkan hasil penelitian pada 3 (tiga) Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu, Implikasi strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah:

1. Melakukan upaya pengusahaan atau penggalian (eksploitasi) sumber daya secara lebih intensif baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya lainnya.
2. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Dengan melakukan intensifikasi untuk mendorong komponen penerimaan daerah sisi pajak dan retribusi daerah.
3. Mengoptimalkan keberadaan perusahaan daerah bagi daerah yang memiliki perusahaan daerah.
4. Mengkaji ulang terhadap nilai jual atau jumlah objek pajak yang ada dalam pos bagi hasil pajak (pemerintah pusat dan provinsi) seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sudah dilimpahkan ke daerah dengan melakukan pengkajian ulang atas jumlah objek dan subjek pajak di setiap daerah. Demikian pula halnya dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan pajak, menambah jumlah pajak daerah secara proporsional dan profesional dengan melihat potensi pajak, dan retribusi daerah secara maksimal.
5. Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi perlu diupayakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru meliputi, menciptakan sektor produksi baru melalui upaya dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik (perijinan, lahan, market yang jelas, dan insentif pajak) untuk menanamkan investasinya ke daerah dan menarik investor dengan didukung oleh birokrasi yang mudah dan infrastruktur yang mendukung, menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif.

6. Identifikasi sektor unggulan terhadap potensi daerah perlu terus digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber PAD potensial, misalnya sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, dan perdagangan.
7. Meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan pengawasan melakat dari internal pemerintahan untuk menghindari terjadinya KKN.
8. Dalam merencanakan belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko harus memperhatikan kebutuhan daerahnya dan bisa mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa tergantung pada pemerintah pusat/provinsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasanyang telah diuraikan maka analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah pada tigakabupaten pemekaran (Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah)tahun anggaran 2010-2014 Provinsi Bengkulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis perbandingan kinerja keuangan Kabupaten Mukomuko, Seluma, Bengkulu Tengah : Rasio Kemandirian daerah Kabupaten Mukomuko, Seluma, Bengkulu Tengah berada pada kriteria “Rendah Sekali” dengan pola hubungan “instruktif” yang memiliki makna bahwa peran pemerintah pusat sebagai sumber keuangan daerah lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan kata lain pemerintah daerah tiga kabupaten pemekaran belum mampu melaksanakan fungsi otonomi daerah secara maksimal. Kabupaten Mukomuko lebih tinggi Rasio Kemandiriannya dibandingkan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Mukomuko, Seluma, Bengkulu Tengah berada pada karagori “Sangat Kurang” hal ini menandakan besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah tiga kabupaten pemekaran kepada pemerintah pusat yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD



dalam menopang pendapatan daerah. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Mukomuko lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Selanjutnya Rasio Efektivitas Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Tengah dengan kriteria “Cukup Efektif” hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah belum mampu memenuhi pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Sementara Kabupaten Seluma Rasio Efektivitasnya berada pada katagori “Sangat Efektif” yang artinya Kabupaten Seluma telah mengoptimalkan sumber penerimaan daerah terlihat dari besarnya realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan. Rasio Efektivitas Kabupaten Seluma lebih baik dibandingkan Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Tengah.

Berdasarkan Rasio Efisiensi Kabupaten Mukomuko, Seluma, Bengkulu Tengah berada pada katagori “Tidak Efisien” hal ini mengandung makna bahwa realisasi belanja tiga kabupaten pemekaran lebih besar dari pada realisasi pendapatannya. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki Rasio Efisiensi yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Mukomuko. Rasio Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko “Telah Sesuai” dengan peruntukannya yang terlihat dari besarnya belanja langsung dari pada belanja tidak langsung. Namun rasio keserasian belanja Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah “Belum Sesuai” dengan peruntukannya yang terlihat dari besarnya belanja tidak langsung dari pada belanja langsung seharusnya dalam penggunaan anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja

langsung agar kualitas output meningkat dan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Selanjutnya ditinjau dari Rasio Ketergantungan keuangan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah tergolong “Tinggi” hal ini mengandung makna bahwa tingkat ketergantungan keuangan ketiga kabupaten pemekaran terhadap pemerintah pusat maupun provinsi masih tinggi. Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Mukomuko lebih rendah dibandingkan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Analisis perbandingan kemampuan keuangan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah berdasarkan hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah ditemukan bahwa nilai *Share* pendapatan asli daerah atas total belanja daerah pada tiga kabupaten pemekaran menunjukkan hasil yang rendah. Nilai pertumbuhan (*Grwoth*) pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada ketiga kabupaten pemekaran tersebut menunjukkan hasil yang tinggi.

Dengan posisi yang sedemikian dilihat dari tingkat *Share* dan *Growth* atas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai daerahnya menempatkan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah berada pada peta kemampuan keuangan daerah menurut bapenas 2003 termasuk pada kuadran II. Jika dihubungkan dengan Tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran maka dapat dimaknai bahwa Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Bengkulu Tengah. Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang

memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya pada analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2010-2014 pada tiga kabupaten pemekaran Provinsi Bengkulu, maka beberapa hal yang dapat disaran oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah dilihat dari perbandingan kinerja keuangan berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas, Efisiensi, Keserasian Belanja, dan Ketergantungan Daerah untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah untuk menyelaraskan peningkatan dana perimbangan dengan penerimaan pendapatan asli daerah pada tiga kabupaten pemekaran yang menyebabkan nilai rasio kemandirian daerah tidak stabil, dengan cara peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah secara maksimal yang bersumber dari pajak dan retribusi serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi guna peningkatan penerimaan serta pembangunan daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah dalam menggunakan belanja daerah, agar lebih banyak menggunakan belanja langsung dari pada belanja tidak langsung guna peningkatan kualitas output meningkat dan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah agar dapat mengurangi ketergantungan kepada pihak eksternal guna mengurangi besarnya pinjam serta bantuan pusat/provinsi dan total pendapatan masing-masing daerah, dengan cara mengefektifkan dan mengefisienkan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta mengkaji ulang terhadap nilai jual atau jumlah objek pajak bagi hasil pemerintah pusat/provinsi seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah dalam menjalankan otonomi daerah, untuk merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah dan meningkatkan sumber daya manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan pemerintah daerah untuk menyelaraskan antara belanja daerah dengan penerimaan daerah dengan menekan prinsip ekonomis, efektivitas, efisiensi sesuai dengan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat guna mengurangi pemborosan pada anggaran belanja daerah.

2. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah dilihat dari hasil perbandingan kemampuan keuangan berdasarkan hasil perhitungan Share dan Growth, peta kemampuan keuangan untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah dengan cara menggali sumber daya alam yang baru yang berasal dari sektor pariwisata, perkebunan, pertambangan dan pertanian serta membuka peluang usaha untuk investor mengelola dan menankan modalnya pada pemerintah daerah guna peningkatan penerimaan daerah, guna peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah dalam menopang pendapatan penerimaan daerah yang lebih baik.

Pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah dengan peningkatan pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan sumber pendapatan baru dengan pola kemitraan serta melakukan pengawasan melakat terhadap sumber-sumber pendapatan daerah seperti sektor pajak dan retribusi.

Diharapkan agar para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan dan kemampuan keuangan maupun tingkat kesejahteraan masyarakat hendaknya juga melakukan perbandingan untuk keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, sehingga dapat diketahui lebih jelas gambaran kinerja keuangan dan kemampuan keuangan serta tingkat kesejahteraan di Provinsi Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah M, Nur & Yuyun Wiendyawati. (2012). *Analisis PDRB Kota Magelang Tahun 2013*, Magelang: Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
- Andiantoko Hony (2013) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Blora (Studi Kasus DPPKAD Kab. Blora Tahun 2007-2011)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Andita Puspita Wardhani. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005-2010. Skripsi*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Anzar, Muhammad Karya Satya. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dipublikasikan.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko(2014). *Mukomuko Dalam Angka Tahun 2014*. Katalog BPS 1102001,1706
- Bisma, I Dewa Gde & Hery Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007. Jurnal, GaneC Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3*, Mataram.
- Dwirandra. 2008. *Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonomi Kabupaten / Kota Provinsi Bali Tahun 2002-2006. Jurnal Ilmiah, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Udayana*. Denpasar
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis laporan Keuangan*. Cetakan pertama. Alfabeta. Bandung

- Gustari, Akhmad. 2014. Evaluasi Kinerja Keuangan Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu. *Tesis*. Universitas Bengkulu.
- Halim, Abdul (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Moh. (2009) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta*.
- Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martani, Dwi. (2011). PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan Revisi 2013. Departemen Akuntansi FE UI. Diakses dari <http://staff.blog.ui.ac.id/martani> pada 8 September 2014 jam 10.30 WIB.
- Muchtar Masita, Kawalung Goerge dan Rompas Wensy (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 14 No 2-mei 2014. Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Univesitas Sam Ratulangi Manado.

- Menteri Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Nabila Astriana Muhibtari (2014) *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang 2008-2012*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurhidayat. (2005). *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nurulafifah Tyas (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sleman Tahun 2006-2010*. Jurnal Kajian Pendidikan dan Akuntansi Indonesia Edisi I Volume I /Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah . 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Puspitasari Febrianti Ayu (2012) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Financial Performance Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Puspita, Ria. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. *Tesis*. Universitas Bengkulu.
- Republik Indonesia. 1975. Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*.
- Republik Indonesia. 1975. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1975. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian kuantitatif & kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Ulum, Ihyaul. (2009). *Audit Sektor Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.



Ulum, Bahrul Rusydi. 2010. Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.

Yin, Robert K. (2006). *Studi Kasus-Desain & Metode*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zhufinsa Aulia Nur Rahmatina. (2011). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009*. Skripsi. Institut Manajemen Telkom Bandung.

# LAMPIRAN